

LAPORAN TAHUNAN 2007



Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Departemen Pertanian
2008

LAPORAN TAHUNAN

T.A. 2007



PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN

2008

LAPORAN TAHUNAN

T.A. 2007

Penanggung Jawab : Tahlim Sudaryanto

Ketua : Handewi P. Saliem

Sekretaris : Erma Suryani

Anggota : Nizwar Syafa'at
Rudy S. Rivai
Yuni Marisa
Supena Friyatno
Iwan Setiajie Anugrah
Agus Subekti
Wahida
Herlina Tarigan
Nur Khoiriyah Agustin
Yana Supriyatna

PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN

2008

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan yang disampaikan adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan institusi pemerintahan/negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dilaksanakannya. Tupoksi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah mengembangkan kemampuan dalam meng-antisipasi berbagai permasalahan sosial ekonomi pertanian di tingkat pedesaan, wilayah, nasional, kawasan, dan internasional, sekaligus menganalisisnya dalam rangka menghasilkan kebijakan.

Laporan Tahunan ini menguraikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha, Bidang Program dan Evaluasi, serta Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Hasil Analisis, pada Tahun Anggaran 2007. Materi pokok yang disajikan dalam laporan ini meliputi organisasi PSEKP, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penelitian, program, pendayagunaan hasil analisis maupun publikasi dan kerja sama penelitian, serta monitoring dan evaluasi. Khusus untuk kegiatan penelitian, pada Laporan Tahunan ini juga menyajikan sinopsis hasil-hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan PSEKP pada tahun 2007.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan kinerja di masa-masa mendatang.

Bogor, Januari 2008

Kepala Pusat,

Dr. Tahlim Sudaryanto
NIP. 080 035 289

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Visi dan Misi.....	2
1.3. Organisasi	3
1.4. Sasaran Kelompok Pengguna	3
II. SUMBERDAYA MANUSIA.....	5
III. SARANA DAN PRASARANA	8
3.1. Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	8
3.2. Barang-barang Bergerak	8
IV. PROGRAM.....	11
4.1. Tujuan Kegiatan	11
4.2. Luaran.....	11
4.3. Perencanaan Kegiatan Penelitian	11
4.4. Perencanaan Penelitian Tahun Anggaran 2008.....	14
V. SINOPSIS PENELITIAN.....	16
5.1. Penelitian Perdagangan Internasional	16
5.2. Penelitian Sosek Sumberdaya Pertanian dan Agribisnis	17
5.3. Kaji Ulang Kebijakan dan Program Pertanian.....	20
5.4. Dinamika Sosial Ekonomi Pedesaan dan Profil Pertanian.....	23
5.5. Penelitian, Pemberdayaan dan Rekayasa Model Kelembagaan Masyarakat Pertanian	26
5.6. Estimasi dan Proyeksi Indikator Pembangunan dan Input Utama Pertanian dan Pedesaan.....	31
VI. PENDAYAGUNAAN HASIL ANALISIS DAN KERJASAMA PENELITIAN	38
6.1. Publikasi Hasil-hasil Penelitian.....	38
6.2. Komunikasi dan Dokumentasi Hasil Penelitian.....	49
6.2.1. Seminar	49
6.2.2. Pameran dan Ekspose	53
6.2.3. Rapat Dewan Redaksi	54

6.2.4. Dokumentasi	54
6.2.5. Pembuatan dan Pemeliharaan Website PSEKP ..	54
6.3. Kerjasama Penelitian.....	55
VII. EVALUASI DAN PELAPORAN.....	58
7.1. Ruang Lingkup.....	58
7.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	58
7.2.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian.....	59
7.2.2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Penelitian ..	65
VIII. ANGGARAN.....	70
IX. PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Jumlah Tenaga Fungsional PSEKP Tahun 2007.....	6
2.2. Jumlah Peneliti Menurut Disiplin Ilmu dan Tingkat Pendidikan pada tahun 2007 dan Proyeksi Jangka Panjang.....	7
3.1. Daftar Kondisi Barang Inventaris Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2007.....	9
5.1. Variabel yang Mempengaruhi Secara Signifikan terhadap Permintaan Pupuk, Menurut Jenis Pupuk.....	36
6. 1. Judul dan Penulis Naskah JAE tahun 2007.....	38
6.2. Judul dan Penulis Naskah FAE tahun 2007.....	39
6.3. Judul dan Penulis Naskah AKP tahun 2007.....	40
6.4. Daftar Judul dan Penulis Naskah Working Paper yang Terbit Tahun 2007.....	42
6.5. Judul dan Penulis Naskah Tematik yang Terbit Tahun 2007.....	43
6.6. Judul dan Penulis Naskah Prosiding “Kinerja dan Prospek Pembangunan Pertanian Indonesia”.....	43
6.7. Judul dan Penulis Naskah Prosiding Seminar Nasional “Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan : Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat”..	44
6.8. Daftar Isi Terbitan Newsletter PSEKP Tahun 2007.....	46
6.9. Distribusi Publikasi Ilmiah.....	48
6.10. Susunan Dewan Redaksi JAE, FAE, dan AKP Tahun 2007.	49
6.11. Judul Makalah dan Pembicara pada Seminar Rutin tahun 2007.....	50
6.12. Judul Makalah dan Pembicara pada Seminar Nasional tahun 2007.....	51

6.13.	Inventarisasi Kegiatan Kerjasama Penelitian Tahun 2007 ..	55
6.14.	Kunjungan ke Luar Negeri Staf Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.....	56
8.1.	Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2007 (Per 31 Desember 2007)	71
8.2.	Rekapitulasi PNBK Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2007 (Per Desember 2007).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.....	4
2.1. Proporsi Pegawai PSEKP Berdasarkan Umur	5
2.2. Proporsi Pegawai PSEKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	5
2.3. Proporsi Pegawai PSEKP Berdasarkan Golongan	5
2.4. Proporsi Pegawai PSEKP Berdasarkan Masa Kerja.....	5

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian sosial ekonomi dan kebijakan merupakan penelitian yang memiliki arti strategis, karena:

- (1) Memberikan landasan, arah dan prioritas penelitian yang dilaksanakan, agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan;
- (2) Mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang mempengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani;
- (3) Mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usahatani; dan
- (4) Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan serta program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Departemen Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani yang paling mutakhir.

Hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan yang telah dicapai meliputi: (1) Rumusan alternatif kebijakan ekonomi makro, ekonomi mikro, dan kelembagaan dalam mendukung pengembangan ekonomi pedesaan yang progresif, (2) Rumusan alternatif kebijakan dalam pengembangan produksi dan produk pertanian dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas unggulan, (3) Rumusan alternatif kebijakan kelembagaan pengembangan sistem komoditas dan agribisnis, dan (4) Rumusan alternatif kebijakan alokasi sumberdaya pertanian dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan dan keunggulan komparatif wilayah.

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan sebuah lembaga penelitian/pengkajian eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian dan pembinaannya berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Berdirinya PSEKP berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada tahun 1974. Seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali lembaga ini mengalami perubahan nama. Pada tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990 dan selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pertanian No.99/Kpts/OT.210/2/2001, tanggal 1 Februari 2001 menjadi Pusat Penelitian dan

Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek). Status terakhir (Juli 2005), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 328/Kpts/OT.220/8/ 2005 tentang Pembinaan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dinyatakan bahwa PSEKP dibina oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan memperhatikan kebutuhan tugas-tugas khusus Menteri. Dalam melaksanakan tugas-tugas khusus tersebut Sekretaris Jenderal diberi kewenangan untuk menugaskan dan memanfaatkan tenaga PSEKP.

Dalam periode tahun 1974-2008, PSEKP telah dipimpin oleh enam Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Dr. Ahmad Suryana (1995-1998), Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002), Dr. Pantjar Simatupang (2002-2005) dan Dr. Tahlim Sudaryanto (2005-sekarang).

Laporan Tahunan ini merupakan laporan kegiatan PSEKP selama tahun 2007. Materi pokok yang dicakup dalam laporan ini meliputi organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penelitian, program, sinopsis kegiatan penelitian TA. 2007, pendayagunaan hasil, publikasi hasil dan kerjasama penelitian, monitoring dan evaluasi, serta anggaran.

1.2. Visi dan Misi

Visi PSEKP adalah menjadi lembaga pengkajian yang kritis dan terpercaya bertaraf internasional dalam menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian, serta proaktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP adalah lembaga pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Visi di atas akan diwujudkan melalui misi yang akan dijadikan sebagai arahan kegiatan PSEKP yaitu:

- (1) Melakukan analisis dan pengkajian guna menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian yang merupakan produk primer PSEKP;
- (2) Analisis kebijakan, yaitu kegiatan untuk mengolah informasi dan ilmu pengetahuan hasil analisis menjadi rumusan usulan dan pertimbangan kebijakan pembangunan pertanian;

- (3) Melakukan advokasi pembangunan pertanian, berupa kampanye publik untuk memobilisir partisipasi lembaga terkait dan masyarakat luas dalam mendukung pembangunan pertanian;
- (4) Mengembangkan kemampuan institusi PSEKP sehingga mampu mewujudkan visi dan misinya secara berkelanjutan.

1.3. Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan Pasal 176 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2005, tugas PSEKP adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Sementara fungsinya (Pasal 177) dalam hal: (1) Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; (2) Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian; (3) Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian; (4) Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; (5) Pelaksanaan kerjasama dan mendayagunakan hasil analisis dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; (6) Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan (7) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

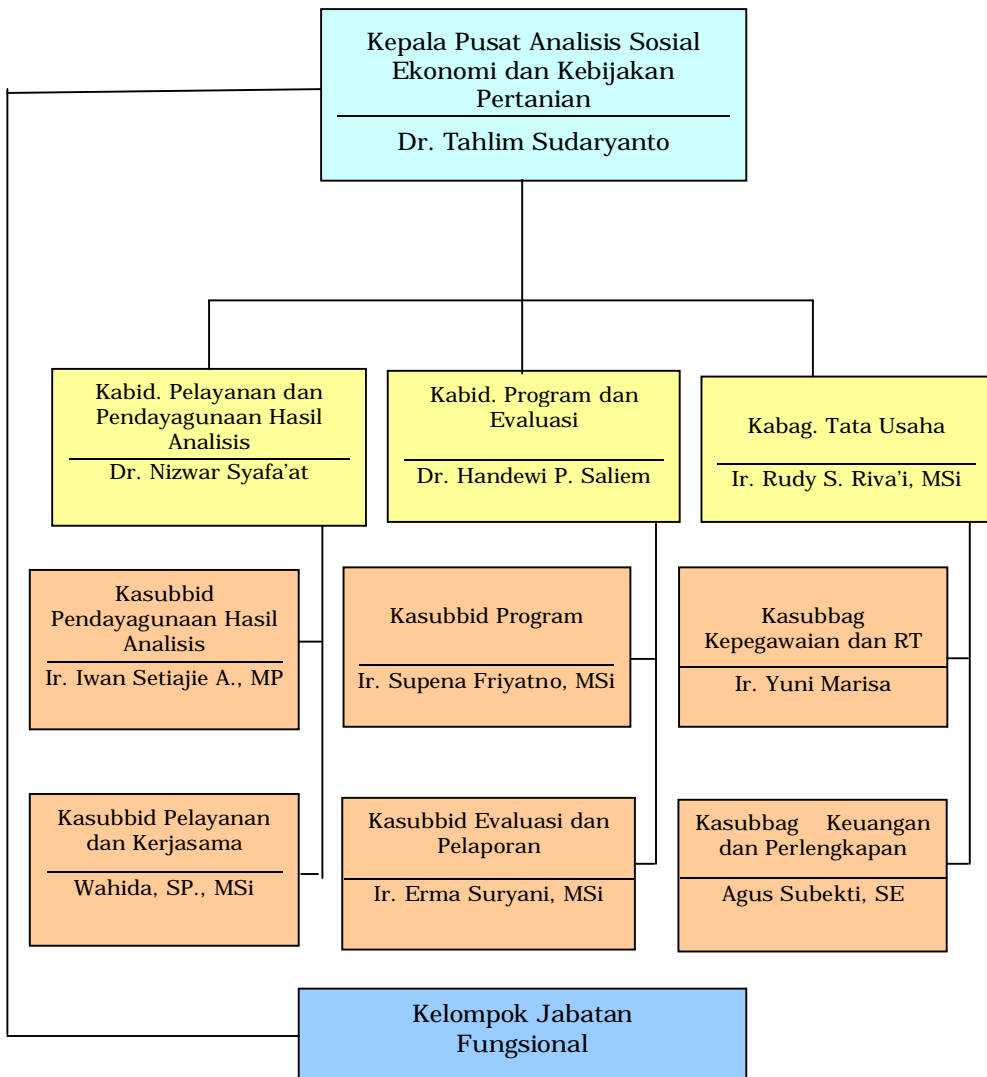
Struktur Organisasi

Struktur organisasi PSEKP secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.1. Dalam struktur organisasi PSEKP tersebut terdapat tiga jajaran eselon tiga (Kepala Bidang/Bagian) dan enam jajaran eselon empat (Kepala Sub Bidang/Sub Bagian).

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti terbagi dalam tiga Kelompok Peneliti (Kelti) yaitu (1) Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional; (2) Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis dan (3) Sosio-Budaya Pedesaan Pertanian.

1.4. Sasaran Kelompok Pengguna

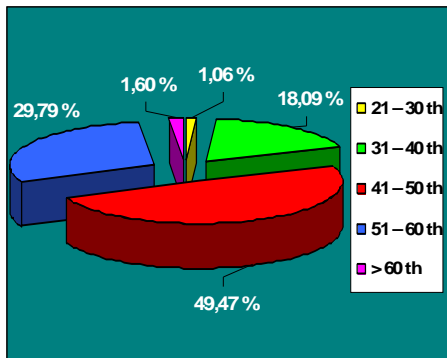
Pengguna utama (stakeholders) hasil penelitian PSEKP ialah: (1) Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Departemen Pertanian pada khususnya dan lembaga negara lainnya pada umumnya, (2) Praktisi agribisnis, petani, dan pengusaha agribisnis, dan (3) Masyarakat umum. Dengan demikian, program penelitian PSEKP harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok stakeholders utama di atas. Tentu saja disamping untuk stakeholders utama, hasil-hasil penelitian tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti Politisi, ilmuwan dan masyarakat peminat pembangunan pertanian, dan para peneliti PSEKP sendiri.



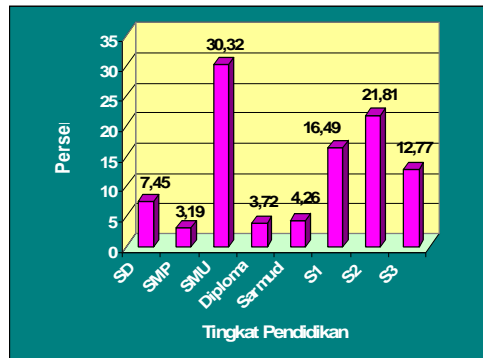
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

II. SUMBERDAYA MANUSIA

Secara keseluruhan jumlah pegawai Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2007 sebanyak 188 orang. Gambar 2.1. memperlihatkan struktur pegawai PSEKP berdasarkan umur. Sebagian besar (49,7%) berumur 41 – 50 tahun dan tidak ada yang berumur dibawah 21 tahun. Sebaran pegawai PSEKP berdasarkan jenis kelamin, pegawai pria sebanyak 134 orang (71,28 persen) dan wanita sebanyak 54 orang (28,72 Persen). Sebaran proporsi pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

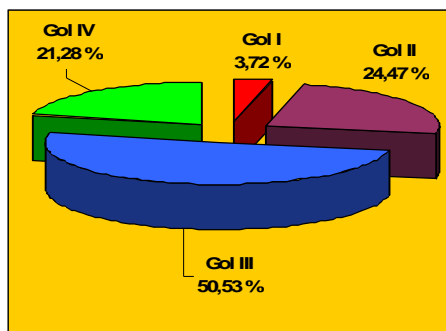


Gambar 2.1. Proporsi Pegawai PSEKP Berdasarkan Umur

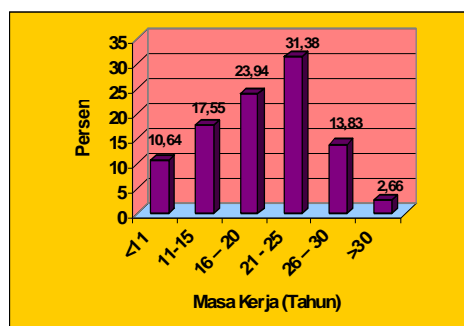


Gambar 2.2. Proporsi Pegawai PSEKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, proporsi pegawai PSEKP pada tahun 2007 seperti yang terlihat pada Gambar 2.3. Sementara sebaran proporsi menurut masa kerja dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.3. Proporsi Pegawai PSEKP Berdasarkan Golongan



Gambar 2.4. Proporsi Pegawai PSEKP Berdasarkan Masa Kerja

Jumlah pegawai PSEKP berdasarkan jabatan fungsional pada tahun 2007 terdiri atas 82 orang fungsional peneliti (92,13 persen) dan 7 orang fungsional non peneliti (7,87 persen). Fungsional non peneliti terdiri dari Pranata Komputer Terampil Pelaksana, Pustakawan, Arsiparis, dan Litkayasa. Sebaran jumlah tenaga fungsional PSEKP tahun 2007 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Tenaga Fungsional PSEKP Tahun 2007

Jenjang Fungsional	Jumlah (Orang)	Proporsi (%)
Fungsional Peneliti		
Peneliti Utama	17	19,10
Peneliti Madya	17	19,10
Peneliti Muda	17	19,10
Peneliti Pertama	14	15,73
Peneliti Non Klas	17	19,10
Total	82	92,13
Fungsional Non Peneliti		
Pranata Komputer Terampil Pelaksana	1	1,12
Litkayasa Pelaksana Lanjutan	2	2,25
Pustakawan Pertama	1	1,12
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	2	2,25
Arsiparis Penyelia	1	1,12
Total	7	7,87
Total Fungsional Peneliti + Non Peneliti	89	100,00

Terkait dengan kegiatan tugas belajar, pada tahun 2007, ada 3 orang pegawai yang mengikuti tugas belajar yaitu 2 orang mengikuti program S2 dan 1 orang program S3 di dalam negeri, ketiganya didanai oleh Badan Litbang Pertanian. Sedangkan pegawai yang mengikuti training jangka pendek berjumlah 6 orang, 2 orang terkait dengan training perdagangan di dalam negeri dan 4 orang mengikuti diklat fungsional peneliti tingkat pertama di LIPI.

Sebagai lembaga penelitian yang mempunyai mandat nasional, maka perencanaan pengembangan staf PSEKP harus mencerminkan kemampuan analisis dalam bidang kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan, aspek pengelolaan sumber daya, aspek pengembangan sistem usaha pertanian, dan aspek sosial serta kelembagaan. Tabel 2.2 memperlihatkan keadaan staf peneliti menurut sebaran disiplin ilmu pada tahun 2007. Terlihat bahwa sekitar 50 persen staf peneliti mempunyai disiplin ilmu ekonomi pertanian, yang terbagi menurut bidang keahliannya, yaitu ekonomi internasional, ekonomi makro, politik pertanian, ekonomi produksi, ekonomi mikro, sosiologi pertanian, dan agribisnis/pemasaran.

Tabel 2.2. Jumlah Peneliti Menurut Disiplin Ilmu dan Tingkat Pendidikan pada tahun 2007 dan Proyeksi Jangka Panjang

No.	Disiplin Ilmu	Tingkat Pendidikan			Proyeksi Jangka Panjang		
		S3	S2	S1	S3	S2	S1
1.	Agribisnis	-	-	3	-	-	2
2.	Agronomi	-	-	1	-	-	2
3.	Akuntansi	-	-	1	-	-	-
4.	Bioteknologi	-	-	1	-	-	-
5.	Ekologi Pertanian	1	-	-	-	-	-
6.	Ekonomi	1	-	-	-	-	2
7.	Ekonomi Manajemen	-	-	1	-	-	2
8.	Ekonomi Pembangunan	-	3	-	-	3	2
9.	Ekonomi Pertanian	4	21	3	15	15	10
10.	Ekonomi Perusahaan	-	-	2	-	-	-
11.	Ekonomi Sumberdaya Alam	1	-	-	2	2	-
12.	GMSK	-	-	1	-	-	1
13.	Ilmu Pertanian	1	1	-	-	-	-
14.	Ilmu Tanaman	-	1	-	-	-	-
15.	Komunikasi Pembangunan	-	2	-	2	2	-
16.	Manajemen	-	-	2	-	-	2
17.	Manajemen Perusahaan	-	1	-	-	-	-
18.	Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan	1	3	-	2	3	-
19.	Sistem Usaha Tani	1	-	-	2	2	3
20.	Sosial Ekonomi Pertanian	-	-	2	-	2	5
21.	Sosiologi Pertanian	3	8	1	5	3	3
22.	Teknologi Hasil Pertanian	-	-	1	-	-	-
Jumlah		13	40	19	28	32	34

Permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Kepegawaian dan Rumah Tangga pada tahun 2007 adalah pengurusan administrasi kepegawaian. Banyaknya instansi yang terkait seperti Sekretariat Badan Litbang, Biro Organisasi dan Kepegawaian, LIPI, BKN, Sekretariat Negara dan lain-lain, menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Upaya mengatasi permasalahan sudah dilakukan berupa koordinasi dengan instansi terkait, namun belum memperoleh hasil yang optimal.

III. SARANA DAN PRASARANA

Pelaksanaan kegiatan penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak. Pengadaan barang-barang inventaris berasal dari hibah, pembelian melalui anggaran rutin dan anggaran pembangunan (APBN) maupun anggaran kerjasama penelitian. Untuk dapat menyajikan data inventaris yang akurat, pada tahun anggaran 2007 PSEKP tetap melaksanakan penggunaan SIMKAP. Secara rinci daftar keadaan barang inventaris Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Pengelolaan inventaris kekayaan milik negara (IKMN) secara tersurat menjadi tanggung jawab tata usaha, tetapi secara moral adalah tanggung jawab seluruh pegawai yang menggunakan. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut belum disadari oleh berbagai pihak, terbukti kepedulian terhadap rasa memiliki masih rendah. Hal tersebut merupakan salah satu kendala untuk dapat mengelola IKMN secara baik dan akurat.

3.1. Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Barang-barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian meliputi tanah dan bangunan. Keseluruhan tanah yang dimiliki oleh PSEKP adalah seluas 5.403 m². Bangunan yang dimiliki oleh PSEKP adalah kantor yang terdiri atas dua unit bangunan yang saling terhubung seluas 3.266 m² dan empat buah rumah dinas seluas 240 m² secara keseluruhan dalam kondisi baik (Tabel 3.1).

3.2. Barang-barang bergerak

Pada periode 2007, jumlah barang-barang bergerak yang dimiliki oleh PSEKP sebesar 1517 unit barang, dengan 1412 unit barang diantaranya dalam kondisi yang baik dan 105 unit barang lainnya dalam kondisi rusak (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Daftar Kondisi Barang Inventaris Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2007

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
I	BARANG TIDAK BERGERAK				
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1 (1,558 m)	1	0	0
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 (3,845 m)	1	0	0
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 (3,266 m)	2	0	0
4	Rumah Negara Gol. II type A Permanen	4 (240 m)	4	0	0
	Total Barang Tidak Bergerak	8 (8,909 m)	8	0	0
II	BARANG BERGERAK				
5	Jeep	5	0	0	5
6	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	12	11	1	0
7	Sepeda Motor	11	11	0	0
8	Auto lift	1	1	0	0
9	Tripod	1	1	0	0
10	Tes Generator	1	1	0	0
11	Mesin ketik manual portable (11-13 inci)	13	12	1	0
12	Mesin ketik elektronik/selektik	4	0	1	3
13	Mesin hitung elektronik/calculator	6	6	0	0
14	Lemari besi/metal	66	60	4	2
15	Lemari kayu	33	29	2	2
16	Rak Besi	10	10	0	0
17	Rak kayu	50	30	20	0
18	Filling cabinet besi	118	112	2	4
19	Brankas	10	10	0	0
20	Overhead Projektor	4	3	1	0
21	Meja kerja kayu	220	215	3	2
22	Kursi besi/metal	595	540	24	31
23	Sice/sofa	19	17	2	0
24	Meja rapat	37	37	0	0
25	Jam elektronik	7	7	0	0
24	AC Split	65	63	1	1
25	Radio	1	0	1	0
26	Televisi	1	1	0	0
27	Video Cassete	1	0	1	0
28	Tape recorder	4	1	3	0

Tabel 3.1. Lanjutan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
29	Amplifier	2	2	0	0
30	Equalizer	1	1	0	0
31	Loudspeaker	10	10	0	0
32	Mic confrence	32	32	0	0
33	Unit power supply	1	1	0	0
34	Stabilisator	2	2	0	0
35	Tustel	3	3	0	0
36	Microphone/wireless mic	4	4	0	0
37	Delay unit	16	16	0	0
38	Blitzzer	3	3	0	0
39	Power supply	1	1	0	0
40	Slide Projector	4	4	0	0
41	Lensa Kamera	4	4	0	0
42	Layar film	1	1	0	0
43	Facsimile	3	3	0	0
44	Mainframe	25	25	0	0
45	Komputer Desktop	101	101	0	0
46	Note book	7	7	0	0
47	Printer	49	49	0	0
48	Scanner	1	1	0	0
49	Server	3	3	0	0
50	Mesin foto copy	1	1	0	0
51	Mesin Jilid	2	2	0	0
52	Mesin press	1	1	0	0
53	Troli	1	1	0	0

Keterangan : B : Baik; R : Rusak; RS : Rusak Sekali

IV. PROGRAM

Upaya menyempurnakan program penelitian di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sangat terkait dengan program-program yang disusun berdasarkan perencanaan yang dilakukan. Penyusunan perencanaan tersebut diharapkan mampu mengikuti tuntutan perkembangan pembangunan pertanian dan sejalan dengan perubahan tupoksi lembaga yang bersangkutan. PSEKP merupakan perubahan nama dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (PSE) secara substansial tidak berubah fungsi. PSEKP mempunyai tugas utama melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Penyusunan program kegiatan dilakukan dengan dasar pertimbangan tupoksi PSEKP seperti yang dijelaskan pada Bab I.

4.1. Tujuan Kegiatan

Secara umum penyusunan program kegiatan PSEKP bertujuan untuk mendapatkan arah penelitian yang lebih terencana dan sistematis agar pelaksanaan penelitian lebih layak untuk dilaksanakan. Secara rinci pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk (1) Membuat perencanaan dan kalender kegiatan penelitian PSEKP; (2) Merencanakan penelitian tahun anggaran 2008; dan (3) Memperoleh implikasi tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang.

4.2. Luaran

Luaran yang diharapkan dalam kegiatan penyusunan program adalah (1) Paket perencanaan dan kalender kegiatan penelitian PSEKP; (2) Program perencanaan penelitian tahun anggaran 2008; dan (3) Implikasi tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang

4.3. Perencanaan Kegiatan Penelitian

Ruang lingkup perencanaan dan kalender kegiatan penelitian pada awalnya mencakup (1) Perencanaan kegiatan penelitian rutin (DIPA), dan (2) Perencanaan kegiatan non-DIPA (RUT). Namun seiring dengan perubahan paradigma sistem penganggaran di Ditjen Anggaran, dimana sistem anggaran berubah dari sistem anggaran terpisah (Splitfied Budget) menjadi anggaran yang menyatu (Unified budget) menyebabkan anggaran DIPA dan non-DIPA tidak dibedakan lagi. Dengan sistem yang menyatu tersebut peranan perencanaan program menjadi sangat strategis dalam operasional penelitian sehingga dalam pelaksanaannya, perencanaan program penelitian dan keuangan perlu mendapat dukungan dari semua komponen yang ada dalam lembaga penelitian ini.

Tujuan kegiatan perencanaan kegiatan penelitian ini adalah agar seluruh kegiatan PSEKP dapat terlaksana secara optimal sesuai jadwal yang telah direncanakan. Agar pelaksanaan kegiatan penelitian tidak menyimpang dari jadwal yang ditetapkan, maka disusun kalender kegiatan. Perencanaan penelitian di PSEKP disusun dibawah koordinasi Bidang Program dan Evaluasi bersama-sama dengan Kelompok Peneliti. Bidang Program dan Evaluasi lebih banyak berperan sebagai fasilitator, sedangkan Kelompok Peneliti yang banyak berperan dalam Perencanaan Kegiatan Penelitian. Untuk memudahkan koordinasi pada tahap perencanaan, maka dibentuk Tim Teknis Penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Ketua Kelti dan beberapa peneliti senior PSEKP. Tim Teknis inilah yang akan menggodok perencanaan kegiatan penelitian. Adapun susunan Tim Teknis Penelitian untuk tahun 2007 adalah:

- Pengarah : Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
(Dr. Tahlim Sudaryanto)
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
(Dr. Handewi P. Saliem, merangkap anggota)
- Ketua : Dr. Bambang Irawan, merangkap anggota
- Wakil Ketua : Dr. Nizwar Syafa'at, APU, merangkap anggota
- Sekretaris : Kasubid Program
(Ir. Supena Friyatno, M.Si, merangkap anggota)
- Anggota : 1. Ketua Kelti Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional (Dr. M. Husein Sawit)
2. Wk. Ketua Kelti Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis (Dr. Sumaryanto)
3. Ketua Kelti Sosio-Budaya Pedesaan Pertanian (Dr. Edi Basuno, M.Phil)
4. Prof. Dr. Pantjar Simatupang, APU
5. Dr. Budiman Hutabarat, APU
6. Dr. I Wayan Rusastra
- Staf Pelaksana : 1. M. Suryadi, SP
2. Susi Sulistiawati, SH
3. Chaerudin, SE
4. Tonny Soelistiyo Wahyudi
5. M. Rahmat
6. Melyani
7. Abdurachman
8. Edi A. Saubari

Sejalan dengan Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Litbang Pertanian, dan untuk memudahkan semua pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian, maka perlu disusun seluruh tahapan kegiatan perencanaan mulai dari inisiasi perumusan masalah sampai penyerahan proposal penelitian ke Badan Litbang Pertanian.

Tahap pertama dari siklus proses perencanaan kegiatan penelitian dimulai dengan penjaringan topik-topik penelitian PSEKP oleh Tim Teknis Penelitian, yang disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) PSEKP dan Badan Litbang Pertanian, serta Program Utama PSEKP. Dari berbagai topik penelitian tersebut Tim Teknis Penelitian PSEKP bersama Bidang Program dan Evaluasi selanjutnya merumuskan Rencana Penelitian Tingkat Peneliti (RPTP) beserta kegiatan-kegiatannya. Lebih lanjut, Tim Teknis bersama Bidang Program dan Evaluasi menugaskan peneliti untuk membuat matrik RPTP/kegiatan sesuai dengan judul-judul RPTP/kegiatan yang dirumuskan.

Matrik yang terkumpul kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis Penelitian PSEKP. Tahap selanjutnya adalah penetapan penanggung jawab penyusunan proposal RPTP/kegiatan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Proposal yang masuk kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis Penelitian internal PSEKP. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada penanggung jawab proposal masing-masing untuk menjadi bahan perbaikan proposal tersebut.

Proposal yang telah diperbaiki kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis PSEKP. Setiap proposal dievaluasi oleh dua orang anggota. Pada tahap ini, diberikan saran dan komentar untuk penyempurnaan proposal-proposal terhadap aspek-aspek berikut:

1. Perumusan masalah, review hasil penelitian sebelumnya dan justifikasi penelitian
2. Perumusan tujuan/keluaran
3. Kerangka pemikiran (landasan teoritis/review analisis data)
4. Perencanaan sampling pemilihan (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, responden)
5. Alat analisis dan jenis data untuk menjawab setiap tujuan penelitian
6. Perencanaan operasional (SDM, dana, dan lain-lain)

Komentar dan saran perbaikan proposal ditekankan pada, apakah proposal tersebut :

1. Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan permasalahan dan metode pemecahannya?;
2. Memiliki kemampuan dalam perolehan parameter dan indikator sosial ekonomi atau memiliki kemampuan dalam pengembangan teori dan metode ilmiah?;

3. Hasil risetnya mempunyai keunggulan untuk memecahkan permasalahan pembangunan pertanian?;
4. Penyusunannya memenuhi kaidah-kaidah ilmiah?.

Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada penanggung jawab proposal masing-masing untuk menjadi bahan perbaikan proposal. Selain evaluasi secara tertulis, juga dilakukan pembahasan dan penajaman proposal secara khusus di mana proposal dibahas secara langsung melalui diskusi tim pembahas dan Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan penanggung jawab (tim) penyusun proposal.

Berdasarkan tahap-tahap perencanaan kegiatan penelitian (matrik - RKA-KL - proposal), kerap terjadi perubahan dalam hal judul penelitian, kegiatan penelitian, penanggung jawab penelitian, lokasi penelitian maupun biaya/anggaran penelitian. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyempurnaan perencanaan penelitian dan sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Teknis/Pembahas.

Selain perbaikan proposal, juga dilakukan penyempurnaan matrik program. Hasil penyempurnaan ini menjadi bahan baku untuk penyusunan Sistem Informasi Manajemen Program (SIMPROG). Dengan adanya perencanaan dan kalender tersebut, diharapkan kegiatan yang dihasilkan menjadi lebih terarah, sasaran serta tolok ukur keberhasilannya jelas. Kejelasan ini akan membantu manajemen pengelolaan penelitian sebagai kegiatan utama di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

4.4 Perencanaan Penelitian Tahun Anggaran 2008

Pada tahun anggaran 2008 diusulkan sebanyak 11 judul penelitian/RPTP melalui DIPA Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Sebagai perbandingan, pada tahun anggaran 2007 dilaksanakan 12 judul penelitian/RPTP. Judul-judul proposal penelitian TA 2008 adalah sebagai berikut:

1. Respon Usahatani Skala Kecil Terhadap Liberalisasi Perdagangan
2. Dampak Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Kemiskinan dan Kesempatan Kerja di Pedesaan
3. Analisis Investasi Penelitian dan Pembangunan Pertanian
4. Peningkatan Kapasitas Adaptasi Petani di Daerah Marginal Terhadap Perubahan Iklim
5. Pendampingan dan Koordinasi Pelaksanaan Program PRIMATANI
6. Dampak Dinamika Permintaan Dunia Komoditas Perkebunan Terhadap Usahatani Perkebunan Rakyat

7. Pengembangan Kelembagaan Partnership dalam Pemasaran Komoditas Pertanian
8. Panel Petani Nasional (PATANAS): Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
9. Konsorsium Penelitian: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani pada Berbagai Tipe Agroekosistem
10. Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian: Respon Terhadap Isu Aktual
11. Penyusunan Bahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian

V. SINOPSIS PENELITIAN

Sinopsis kegiatan penelitian PSEKP TA. 2007 dikelompokkan ke dalam 6 kelompok menurut program penelitian. Tahun 2007 ada 6 kelompok penelitian yaitu: (1) Penelitian Perdagangan Internasional; (2) Penelitian Sosial Ekonomi Sumberdaya Pertanian dan Agribisnis; (3) Kaji Ulang Kebijakan dan Program Pertanian; (4) Penelitian dan Rekayasa Model Kelembagaan Penerapan Teknologi dan Agribisnis; (5) Penelitian, Pemberdayaan dan Rekayasa Model Kelembagaan Masyarakat Pertanian, dan (6) Estimasi dan Proyeksi Indikator Pembangunan dan Input Utama Pertanian dan Pedesaan.

5.1. Penelitian Perdagangan Internasional

(1) Analisis Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-China dan Kerjasama AFTA Serta Dampaknya Terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia

Perkembangan Kawasan Perdagangan Bebas (KPB) bersamaan dengan berjalannya perundingan multilateral dalam wadah Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) setidaknya memunculkan dua macam Kesepakatan Perdagangan Terbatas (KPT), yakni Bilateral dan Plurilateral. Indonesia melangkah ke arena persaingan bebas wilayah melalui kesepakatan AFTA, ASEAN-China FTA dan Indonesia-China FTA. ACFTA merupakan salah satu model kerjasama AFTAs dengan Negara Berkembang (NB) yang medannya sangat berbeda dengan model kerjasama dengan Negara Maju (NM) sebagai akibat perbedaan kepentingan NM terhadap Indonesia atau ASEAN. Indonesia sedang melangkah ke arena persaingan bebas dan amat liberal di AFTA. Hal ini akan memberikan peluang untuk merebut pasar sekaligus bisa menjadi ancaman tersendiri.

Pesatnya perkembangan perekonomian China mengisyaratkan dampak tersendiri bagi negara-negara ASEAN. Kesepakatan regional menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia. Keberadaan kebijakan early harvest terbukti berdampak positif bagi kinerja Ekspor komoditas pertanian yang didominasi oleh komoditas perkebunan seperti minyak sawit (151110), karet alam dalam bentuk SIR 20 (400122), karet lembaran (400121) serta karet campuran (400599). Komoditas hortikultura dalam bentuk produk olahan seperti minyak dan lemak sayur serta manggis menjadi primadona yang siap tumbuh untuk dipacu ekspornya. Oleh sebab itu minyak sawit dan produk turunannya sangat potensial untuk dimasukkan ke dalam daftar early harvest package dengan mempertimbangkan nilai ekspor yang cenderung meningkat, sementara kemajuan teknologi biofuel menjadikan peluang untuk mengeksport gaplek (71410) terbuka luas dan cukup menantang.

Dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas baik secara bilateral maupun secara kawasan diperlukan sikap kehati-hatian dalam negosiasi untuk memasukkan komoditas yang terdaftar dalam program pengurangan tarif bea masuk terutama produk yang banyak dihasilkan berupa produk primer. Mengantisipasi impor buah dan sayur dari China dan ASEAN, pemerintah perlu membuat kebijakan yang konsisten dan terintegrasi antar departemen teknis. Peningkatan mutu sangat mendesak sehingga mampu bersaing dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN tahun 2015.

Implikasi Kebijakan meliputi: (1) Diperlukan ketersediaan infrastruktur dan kesiapan dan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan luar negeri, terutama dalam aspek kepabean, perpajakan dan penciptaan iklim yang merangsang investasi, memajukan industri dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja; dan (2) Hasil simulasi menunjukkan bahwa dampak penurunan tariff terhadap produksi, ekspor bersih, PDB dan kesejahteraan sangat positif. Dampak dari penurunan tarif mencapai 100 persen (komoditas yang terkait dengan modalitas). Indonesia akan mengalami perubahan PDB sebesar 0,0027 persen akibat AFTA dan 0,2623 persen dari EHP Indonesia-China. Begitu pula dengan negara-negara mitra seperti China dan ASEAN. Pencapaian kesejahteraan Indonesia akibat EHP Indonesia-China mencapai US\$ 452 juta atau sekitar Rp 4,1 trilyun sedangkan pada AFTA hanya mencapai US\$ 5,34 juta atau sekitar Rp 48 milyar. Begitu pula dengan negara-negara mitra China dan total negara ASEAN lainnya, besarnya kesejahteraan masyarakat meningkat masing-masing sebesar US\$ 381,90 juta atau sekitar Rp 3,4 Trilyun dan US\$ 229,96 juta atau sekitar Rp 2,1 trilyun. Jika prasarana dan sarana yang mendukung terciptanya kondisi liberalisasi perdagangan di Indonesia dapat bersifat lebih kondusif, tidak perlu ada kekhawatiran terjadinya dampak negatif akibat liberalisasi perdagangan.

5.2. Penelitian Sosek Sumberdaya Pertanian dan Agribisnis

(2) Analisis dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian Pada Usahatani Padi dan Sapi Potong

Terkait dengan terjadinya perubahan iklim, risiko usahatani akan semakin meningkat. Jika iklim ekstrim berlangsung untuk waktu cukup panjang, strategi mengatasi risiko yang selama ini diterapkan oleh sebagian besar petani yaitu seperti diversifikasi, penerapan bagi hasil, ataupun pemanfaatan kredit non formal diperkirakan tidak memadai. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara di Uni Eropa, asuransi pertanian telah berkembang sebagai lembaga perlindungan formal yang efektif untuk mengelola risiko usahatani, sedangkan di sebagian besar negara berkembang masih dalam

tahap inisiasi. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam usahatani padi, risiko terbesar terkait dengan peluang gagal panen atau turunnya produktivitas akibat terjadinya banjir, kekeringan, dan serangan hama/penyakit tanaman. Oleh karena di Indonesia belum ada asuransi pertanian untuk usahatani padi dan sapi potong, maka arti dan manfaat asuransi pertanian belum dikenal oleh sebagian besar petani, sehingga belum diperhitungkan sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi risiko usahatani. Pada usahaternakan sapi potong mempunyai tingkat risiko yang rendah, Masyarakat peternakan sapi potong berpendapat bahwa asuransi untuk usaha ini belum diperlukan atau dengan kata lain tidak layak untuk dikembangkan. Tidak demikian pada usahatani padi. Berbasis pada hasil analisis terhadap kondisi empiris sistem usahatani padi di kedua lokasi penelitian, maka disain skim yang sesuai adalah sebagai berikut. Landasan dasar untuk struktur rancang bangun skim asuransi pertanian: (1) Risiko yang layak dicakup adalah multi peril terkait dengan kerugian akibat banjir, kekeringan, dan serangan hama/penyakit tanaman; (2) Oleh karena secara finansial hanya layak jika disubsidi, maka sebaiknya dikelola oleh suatu Badan Usaha Milik Negara; (3) Pendekatan yang sesuai adalah hamperan usahatani; dan (4) Agar efisien, perlu diupayakan agar seluruh atau sebagian besar petani yang menguasai usahatani padi di hamperan tersebut berpartisipasi.

Informasi komprehensif dan mendalam untuk unsur-unsur kunci yang menentukan efektivitas, viabilitas operasional dan keberlanjutan suatu sistem asuransi pertanian sangat dibutuhkan dan himpunan informasi itu lazimnya dapat diperoleh dari suatu kaji tindak atau proyek rintisan. Prasyarat esensial yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan asuransi pertanian mencakup: (1) Tersedianya database yang memadai; (2) Ketersediaan personal yang terlatih; (3) Sistem pemantauan dan evaluasi yang sesuai; dan (4) Adanya suatu sistem yang baik untuk memfasilitasi kelancaran arus informasi, introduksi teknologi, dan gagasan penyempurnaan sistem kelembagaan.

Pemahaman aspek teknis dan manajerial saja tidak memadai karena dimensi kelembagaan dalam rangka pengembangan asuransi pertanian memerlukan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai aspek-aspek ekonomi dan sosial budaya komunitas petani sasaran dan lingkungannya. Proses pembelajaran semua pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah, petani, aparat terkait, maupun pihak pengelola dalam aspek-aspek teknis, manajerial, dan kelembagaan merupakan tahap awal yang harus dilalui dan merupakan bagian integral dari sistem pengembangan. Oleh karena itu, pengembangan sistem asuransi pertanian untuk usahatani padi dapat dilakukan jika dibekali persiapan yang sangat cermat, tuntas, dan konsisten. Tercakup dalam

konteks itu adalah perencanaan dan pelaksanaan proyek rintisan (pilot project) multi lokasi dengan periode pelaksanaan yang cukup.

(3). Analisis Kebijakan Pembiayaan Sektor Pertanian

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara lengkap dan mendalam tentang masalah pembiayaan petani. meliputi besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor pertanian, perkembangan program pembiayaan pertanian pada tiga skim pembiayaan yang dikelola Departemen Pertanian.

Rata-rata nilai anggaran pembangunan pertanian periode tahun 2002-2007 sebesar Rp 17,6 trilyun. Anggaran tertinggi dikelola oleh Dephub, PU dan ESDM. Deptan hanya mengelola sekitar Rp 4,96 trilyun namun mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,77 %/tahun. Pada periode ini rata-rata anggaran pertanian yang terbesar untuk sarana dan prasarana 10,5 %, kemudian bantuan permodalan 8,5 %, penyuluhan 2,7 %, litbang 1,6 %, dan diklat 1,3 %. Pembangunan infrastruktur yang menempati urutan tertinggi dalam alokasi anggaran namun banyak yang tidak bisa beroperasi secara optimal.

Pada tahun 2007, total anggaran pembangunan pertanian mencapai Rp 23,2 trilyun dan Deptan mengelola jumlah yang terbesar yaitu Rp 8,8 trilyun (sekitar 37.89%). Anggaran pembangunan pertanian dialokasikan diberbagai instansi diluar Deptan. Ini menyebabkan adanya tumpang tindih kegiatan. Alokasi untuk sarana dan prasarana sebesar Rp 2,57 trilyun, permodalan dan bantuan pemberdayaan sebesar Rp 1,99 trilyun, penyuluhan Rp 0,57 trilyun, litbang Rp 0,36 trilyun, dan diklat Rp 0,30 trilyun. Meskipun secara nasional pembiayaan pertanian menempati urutan kedua secara nasional, tetapi pengelolaan oleh berbagai instansi menyebabkan target tidak tercapai secara efektif. Alokasi anggaran litbang yang relatif kecil juga menyulitkan temuan dan penerapan inovasi yang unggul dan dinamis. Disarankan alokasi anggaran pembangunan pertanian sebaiknya dipusatkan di Departemen Pertanian.

Program pembiayaan KKP sangat membantu bagi petani pangan maupun peternak. Jangka waktu pengajuan yang lama , jangka waktu pengembalian yang pendek, besarnya agunan, biaya notaris, serta NPWP merupakan hambatan untuk mendapatkan modal kerja. Adanya kelompok sebagai penjamin merupakan instrumen untuk memanfaatkan KKP secara optimal.

SP3 hanya diminati kalangan usaha skala mikro dengan jumlah yang masih relatif sedikit. Proses pengajuan, pencairan kredit terlalu lama, pengembalian cepat dan persyaratan agunan dinilai memberatkan petani kecil. Masyarakat pertanian di sektor hulu hanya sedikit yang memanfaatkan SP3 dibanding penerima kredit yang bergerak di sektor hilir.

LM3 berpotensi menggerakkan perekonomian pedesaan. Komunikasi antar lembaga calon penerima dengan instansi terkait perlu dibina untuk menyiapkan proposal yang layak, Pemberian dana LM3 yang berasal dari dua atau tiga sumber untuk satu lembaga model perlu ditinjau kembali agar bisa dikelola dengan baik serta tidak menimbulkan rasa cemburu dari lembaga lain. Penyaluran LM3 mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi agen pembangunan agribisnis khususnya agroindustri di pedesaan

Strategi pemerintah dalam kebijakan perkreditan sektor pertanian dengan melibatkan perbankan formal sebagai pelaksana merupakan langkah tepat. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan upaya yang sungguh-sungguh didukung kemampuan manajerial dan aksesibilitas petani.

Langkah yang perlu diambil meliputi sertifikasi lahan secara murah dan mudah, pembinaan kelembagaan petani, inovasi teknologi pertanian, pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana produksi secara tepat waktu dengan biaya terjangkau, adanya pengawasan dan pendampingan, jaminan pemasaran produk, dan pendirian lembaga keuangan khusus seperti bank pertanian.

5.3. Kaji Ulang Kebijakan dan Program Pertanian

(4) Kaji Ulang Kebijakan Subsidi dan Distribusi Pupuk

Konstruksi dasar kebijakan subsidi pupuk yang berlaku saat ini antara lain adalah (1) Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang lebih rendah daripada harga pasar dan pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk usahatani rakyat; (2) Subsidi pupuk yang merupakan selisih antara harga pasar dengan HET dibayarkan langsung oleh pemerintah kepada produsen (pabrik) pupuk atau modus subsidi yang diterapkan oleh pemerintah adalah subsidi langsung kepada produsen (pabrik pupuk); dan (3) Sistem distribusi pupuk bersubsidi bersifat terbuka, yaitu sistem distribusi yang hanya memiliki delivery system (sistem distribusi dari produsen/pabrik ke pengecer), tetapi tidak memiliki receiving system (sistem penerimaan oleh petani). Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka juga telah memperbesar kesempatan untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada perusahaan skala besar (perkebunan). Hal ini karena dalam sistem distribusi pupuk yang bersifat terbuka tidak ada sistem penerimaan oleh petani (receiving system) sehingga pengecer/kios resmi dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja termasuk kepada mereka yang tidak berhak. Disamping itu sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka juga telah memungkinkan petani membeli/menggunakan pupuk diatas dosis anjuran sehingga mendorong terjadinya langka pasok.

Kelangkaan pupuk bersubsidi yang disebabkan oleh kelemahan yang terdapat dalam konstruksi dasar kebijakan subsidi pupuk yang berlaku saat ini seringkali memicu terjadinya lonjak harga, sehingga HET yang berlaku menjadi tidak efektif. Kondisi ini membuat pemerintah, DPR maupun masyarakat tidak puas terhadap kebijakan subsidi pupuk yang berlaku saat ini sehingga ada wacana untuk mengganti modus subsidi dari subsidi yang dibayarkan langsung kepada produsen menjadi subsidi yang dibayarkan langsung kepada petani dalam bentuk kupon. Disamping itu ada wacana juga untuk mengganti sistem distribusi pupuk bersubsidi dari bersifat terbuka menjadi bersifat tertutup. Wacana ini cukup beralasan, namun demikian harus disadari bahwa subsidi yang dibayarkan langsung kepada produsen maupun subsidi yang dibayarkan langsung kepada petani dalam bentuk kupon sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian pula sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka maupun yang bersifat tertutup juga sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dalam rangka merespon wacana tersebut maka dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi terhadap modus subsidi dan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah wacana tersebut perlu segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan atau tidak, dan apabila memang perlu segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan maka akan dapat diketahui langkah-langkah yang perlu diambil. Hasil evaluasi terhadap distribusi pupuk bersubsidi di tingkat produsen dan pelaku distribusi (distributor dan pengecer) di provinsi-provinsi lokasi penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sejumlah pertimbangan maka modus subsidi dan sistem distribusi pupuk bersubsidi sebagaimana yang berlaku saat ini masih perlu dipertahankan. Hal ini didasarkan atas tiga pertimbangan utama:

Pertama, hasil evaluasi terhadap prinsip enam tepat (tepat jenis, kualitas, tempat, waktu, harga, dan jumlah), yang tidak terpenuhi hanyalah prinsip tepat jumlah. Ini pun hanya berkaitan dengan realisasi penyaluran per bulan yang umumnya lebih rendah daripada rencana kebutuhan/kebutuhan riil per bulan, sedangkan total realisasi penyaluran selama setahun relatif sama dengan total rencana kebutuhan/kebutuhan riil.

Kedua, hasil evaluasi terhadap distribusi pupuk bersubsidi di tingkat petani di provinsi-provinsi lokasi penelitian menunjukkan bahwa prinsip enam tepat umumnya terpenuhi.

Ketiga, sebagian besar responden petani di provinsi-provinsi lokasi penelitian menyatakan puas terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku dengan alasan utama pupuk bersubsidi mudah diperoleh pada waktu dibutuhkan. Sementara itu agar langka pasok dan lonjak harga pupuk bersubsidi dapat lebih dikendalikan maka langkah-langkah berikut perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik di tingkat provinsi maupun di

tingkat kabupaten perlu lebih didayagunakan dengan cara antara lain menambah anggaran operasional lembaga tersebut; (2) Penegakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan perlu lebih diintensifkan; (3) Penyaluran pupuk per bulannya oleh produsen pupuk harus memperhatikan pola tanam yang dilakukan oleh petani sehingga realisasi penyaluran pupuk dengan rencana kebutuhan/kebutuhan riilnya dapat sinkron.

(5) Kaji Ulang Program Pembangunan Pertanian

Dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah pembangunan pertanian telah dirancang sekitar 28 kegiatan. Oleh karena itu, dinilai perlu mengkaji ulang kegiatan analisis dan sintesis terhadap konsep, implementasi dan dampak program pembangunan pertanian secara selektif. Tahun 2007 Departemen Pertanian mengeluarkan anggaran sekitar Rp 8 triliun dengan kegiatan berfokus pada program Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP). Sementara untuk tahun 2008 difokuskan pada Kaji Ulang Program Subsidi Benih Jagung dan Swasembada Daging 2010.

Program DPM LUEP yang memberi dana talangan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk membeli gabah petani dengan harga yang ditetapkan pemerintah hanya efektif jika harga gabah lebih rendah dari HPP. Kriteria yang digunakan dalam mengalokasikan dana talangan ke kabupaten di seluruh provinsi tidak jelas. Akhirnya operasional LUEP hanya merupakan usaha dagang dan penggilingan gabah yang bersifat komersial, mengutamakan profit. Bagi petani sendiri, dampak DPM terhadap harga gabah yang diterima petani hanya berlaku sesaat pada saat panen karena petani cenderung menjual dicicil sehingga harga yang diterima petani berada di bawah HPP.

Meningkatkan keberhasilan DPM LUEP sebaiknya dilakukan identifikasi yang intensif tentang perkembangan harga gabah sepanjang tahun pada setiap wilayah (kabupaten) sentra produksi sehingga penyerahannya pada lokasi dan waktu yang tepat. Menerapkan pembukuan khusus penggunaan DPM sebagai syarat menjadi LUEP. Menerapkan pendistribusian DPM LUEP dengan berbagai pola dan dengan berbagai bentuk kelembagaan. Disarankan LUEP dalam satu kabupaten dengan harga tertentu bebas membentuk jaringan kerjasama saling menguntungkan antar lokasi.

Pada program subsidi benih jagung terdapat kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pusat yakni mewajibkan petani membayar kembali besaran subsidi yang diterima kepada Kelompok Tani. Kebijakan ini menyebabkan subsidi hanya berlaku pada tingkat kelompok tani (koptan). Pemda juga menilai subsidi kurang mendidik karena tidak mengarahkan ekonomi petani menjadi kuat secara mandiri, terutama tatkala subsidi dihentikan.

Dampak subsidi benih terhadap produksi, produktivitas dan pendapatan petani sangat bervariasi ditentukan oleh penerimaan subsidi benih yang tepat waktu, mutu dan jumlahnya, perubahan cuaca, praktek budidaya yang stagnan, dan pembatasan subsidi hanya untuk satu hektar membuat petani kesulitan memperluas usaha penanaman. Oleh karena itu, target swasembada terlalu ambisius dibandingkan usaha pemerintah untuk merealisasikannya.

Merubah swasembada daging sapi menjadi swasembada sapi bakalan dinilai lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Pemerintah harus mengarahkan program dari peternak tradisional kepada peternak skala kecil dan menengah secara tradisional maupun maju. Setiap daerah yang diunggulkan sebagai gudang ternak nasional melakukan pendataan tentang keberadaan dan kinerja usaha skala kecil dan menengah yang ada di wilayahnya.

Program-program yang dibuat pemerintah bersifat nasional dan berskala kecil dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai. Strategi implementasi program disama ratakan, tidak memperlakukan wilayah unggulan, tetapi berorientasi pada komoditas unggulan. Implementasi program tidak dilaksanakan dengan suatu metoda yang memungkinkan evaluasi dampak program.

5.4. Dinamika Sosial Ekonomi Pedesaan dan Profil Pertanian

(6) Dinamika Sosial Ekonomi Pedesaan: Analisis Perbandingan Antar Sensus Pertanian

Permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian sampai saat ini, antara lain semakin meningkatnya RTP (Rumah Tangga Pertanian), sementara lahan pertanian relatif tetap, atau bahkan menurun akibat adanya konversi lahan ke nonpertanian. Hal ini mengakibatkan pemilikan lahan semakin menurun, tenaga kerja muda dan berpendidikan tinggi semakin enggan bekerja di sektor pertanian, peranan sektor pertanian pada PDB semakin menurun, namun tidak diikuti menurunnya penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, upaya-upaya peningkatan produksi masih menghadapi berbagai kendala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran akan alih fungsi lahan pertanian cukup beralasan karena terjadi pada lahan pertanian produktif dan penggunaan di luar sektor pertanian, serta terjadi pada wilayah dengan infrastruktur baik. Dalam kompetisi global yang tinggi dan terbatasnya pilihan investasi sektor non-pertanian, eksistensi alih fungsi lahan pertanian tersebut tidak dapat dihindari. Perkembangan pertanian yang berimbang antara "land based dan non-land based" akan semakin memperkuat fondasi diversifikasi pertanian dan akan mengurangi ketergantungan yang tinggi dalam pengembangan dan perluasan kebutuhan lahan pertanian.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian adalah sektor tersebut tidak diberi beban yang besar untuk menyerap tenaga kerja pedesaan yang pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah (unskilled-labor) dan dukungan pemerintah terhadap sektor tersebut seharusnya lebih dapat di optimalkan terutama dalam infrastruktur pedesaan. Perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian, lebih mengarah ke subsektor non tanaman pangan, sedangkan sektor di luar pertanian sangat diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan ketersediaan tenaga kerja pada rumah tangga pertanian, serta untuk menarik kelebihan tenaga kerja di sektor primer.

Terobosan teknologi di sektor pertanian terutama pada bagian hilirnya sangat diperlukan, agar mampu menampung kelebihan tenaga kerja di sektor prime (hilir), serta mampu menarik tenaga kerja muda yang berpendidikan untuk berusaha di sektor ini. Tingkat adopsi teknologi yang direfleksikan oleh tingkat partisipasi rumah tangga dan rataan tingkat penggunaan masing-masing jenis teknologi atau sarana produksi di empat provinsi lokasi penelitian dibandingkan dengan rataan tingkat nasional bervariasi menurut sub sektor, jenis komoditas maupun jenis teknologi atau sarana produksi.

Implikasi dari temuan ini adalah dalam penyusunan rakitan paket teknologi perlu mempertimbangkan aspek spesifik lokasi. Dengan adanya indikasi perbedaan tingkat kesejahteraan antar sub sektor yang notabene karena adanya perbedaan nilai komoditi (high value commodities vs low value commodities), maka implikasinya adalah bahwa pemerintah harus melakukan: asesmen peningkatan nilai tambah komoditas yang bernilai rendah (low value commodities) baik di sisi usahatani (perbaikan varitas, penemuan varitas) maupun pada sisi penciptaan kondisi bisnis komoditi yang kondusif, seperti menjaga keseimbangan suplai-demand.

Adanya indikasi bahwa semakin meningkatnya akses kredit untuk memenuhi kekurangan finansial baik untuk investasi, biaya operasional maupun konsumsi, menunjukkan adanya kesanggupan dan kemampuan untuk membayar kredit. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah segera melakukan kajian untuk memetakan segmentasi rumah tangga menurut kapasitas SDM. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dipetakan menurut jenis program pendekatannya, siapa perlu program apa. Pada kenyataannya tidak setiap rumah tangga pertanian perlu bantuan modal, tetapi ada yang tidak perlu modal tetapi perlu bimbingan teknis dan cashflow management (technical assistant), ada yang perlu bantuan modal dengan beban bunga ringan, ada yang perlu jaminan pasar, dan ada juga yang perlu bantuan sosial. Dengan adanya kecenderungan peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga yang semakin melandai dan kondisi ekonomi stagnan dan menurun yang semakin meningkat, maka memiliki implikasi terhadap pemerintah untuk menyusun kebijakan (policy setting) yang memihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil, sehingga jargon kebijakan tersebut harus pro-poor, pro-village, pro-employment dan pro-equity.

Mengingat kecenderungan rata-rata luas pemilikan dan penguasaan lahan yang semakin menurun sehingga porsi perolehan pendapatan dari lahan pertanian semakin kecil, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti : program peningkatan luas garapan lahan melalui konsolidasi garapan, menekan fragmentasi lahan atau mendorong tumbuhnya sumber pendapatan sektor non-landbase, dan meningkatkan nilai tambah. Hal ini pemerintah dapat melakukan melalui fasilitasi agroindustri pedesaan, mulai dari bimbingan teknis (technical assistant), legal aspek produk, sampai kepada membuka peluang pasar.

(7) Analisis Profil Petani dan Pertanian Indonesia

Penelitian ini menganalisis profil petani menurut agroekosistem dan komoditas utama yang diusahakan. Cakupan wilayahnya lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten. Lokasi dipilih secara purposive dengan kriteria utama berdasarkan agroekosistem dan komoditas yang mengikuti sampling frame Patanas dan Sensus Pertanian tahun 2003.

Tiga provinsi yang dipilih adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Di setiap provinsi dipilih lokasi kabupaten yang mewakili agroekosistem dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian di setiap wilayah dataran tinggi dan dataran rendah dikelompokkan lagi menjadi agroekosistem irigasi dan nonirigasi. Dari hasil klasifikasi itu, dipilih 7 desa padi, 2 desa jagung, 2 desa bawang merah, dan 2 desa karet. Pada masing-masing desa contoh dipilih 15 rumah tangga contoh mewakili pemilikan lahan sempit, sedang, dan luas. Data sekunder bersumber dari BPS berupa data Sensus Pertanian 2003, data Susenas 2003 dan 2005, serta dari instansi terkait di lingkup Departemen Pertanian. Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan tabulasi silang, grafik, dan gambar.

Sensus Pertanian tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar (45%-85%) keluarga mempunyai jumlah anggota rumah tangga antara 3-4 orang. Fakta ini mengindikasikan bahwa keluarga petani sudah mulai memperhatikan kualitas hidup anggota rumah tangganya. Dampaknya terhadap usahatani adalah kekurangan tenaga kerja dalam keluarga sehingga penggunaan tenaga kerja luar keluarga dan mekanisasi pertanian semakin meningkat. Dengan demikian, pengembangan mekanisasi pertanian melalui UPJA dan berbagai skim lain semakin diperlukan.

Secara nasional, data sensus 2003 menunjukkan bahwa 69 persen petani masih dalam usia produktif (25-54 tahun). Ada kecenderungan pelambatan tren penawaran tenaga kerja sebagai akibat perubahan pandangan masyarakat terhadap pekerjaan pertanian yang berat dan rendah. Hal ini perlu diantisipasi dengan upaya peningkatan mekanisasi pertanian.

Sebagian besar petani memiliki lahan kurang dari 0.5 hektar, kecuali di Desa Banyu Urip, Mulya Agung, Perdjito, Tugu, dan Gantar. upaya peningkatan kesejahteraan petani dapat dilakukan dengan meningkatkan akses petani terhadap lahan dan meningkatkan intensitas tanam. Aset lahan dan lainnya meningkat sementara pangsa pengeluaran pangan menurun.

Penggunaan benih padi sawah jauh di atas dosis anjuran akibatnya ketersediaan benih di pasar kurang, sehingga petani menggunakan benih turunan. Masalah utama, ketersediaan air irigasi yang tidak memadai. Sistem jaringan irigasi merupakan infrastruktur utama dan prioritas untuk ditingkatkan secara terpadu meliputi irigasi primer, sekunder, tersier, maupun irigasi desa. Program tersebut memerlukan koordinasi yang intensif dengan Departemen PU, Departemen Kehutanan, dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak negatif terhadap kinerja lembaga penyuluhan pertanian daerah. Kepemimpinan kepala desa yang transparan mampu mengaktifkan kelompok tani meskipun peran PPL menurun. Kegiatan revitalisasi untuk memberdayakan Kelompok Tani (Poktan) menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mendorong terbentuknya poktan-poktan baru yang belum operasional dengan kemampuan wirausaha yang rendah, status badan hukum dan terbatasnya sarana-prasarana.

Untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan, lembaga keuangan mikro bukan bank perlu terus dikembangkan sebagai kompetitor bagi para rentenir yang selama ini melayani petani. Pada saat yang sama, peningkatan akses petani terhadap bank perlu terus dilakukan antara lain melalui: (1) Peningkatkan kapasitas kelompok tani sehingga dapat mengelola kebutuhan dana para anggotanya secara kolektif; dan (2) menggunakan apalis lokal sebagai penjamin petani kepada bank.

5.5. Penelitian, Pemberdayaan dan Rekayasa Model Kelembagaan Masyarakat Pertanian

(8) Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Wilayah Tertinggal (Tahap III)

Lokasi kegiatan kaji tindak di dua kabupaten yaitu Sukabumi dan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun ke-3 fokus kegiatan di Sukabumi adalah upaya pemupukan modal kelompok, pelatihan, dan studi banding, sedangkan di Kecamatan Bogor mencakup pelatihan beternak ruminansia kecil dan menumbuhkan kegiatan sebagai alternatif sumber penghasilan. Inti pemberdayaan adalah memfasilitasi masyarakat, agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Data dan informasi primer diperoleh dari hasil pengamatan selama pendampingan, wawancara secara mendalam (in-depth interview) dan validasi (triangulation) dengan alat catatan lapang. Analisis data dan informasi dilakukan dengan perhitungan sederhana berupa nilai rata-rata, frekuensi distribusi, dan tabulasi silang dan disampaikan secara deskriptif.

Proses persiapan yang matang dan komitmen yang tinggi dari pelaksana merupakan modal yang penting dalam melakukan pemberdayaan. Pembentukan kelompok Binangkit misalnya, kelompok ini mempunyai keinginan yang tinggi untuk membantu anggotanya dengan memfasilitasi petani dengan pinjaman saprotan sehingga modal kelompok terkuras, dan berakibat macetnya usaha kelompok. Khusus untuk sub kelompok peternakan, dinilai mempunyai kinerja bagus dan akhirnya memperoleh alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Tugu Pratama dengan nilai Rp. 82 juta. Keterlibatan Dompot Dhuafa (DD) melalui program pemberdayaan Kampoeng Ternak di Sukabumi dapat dianggap sebagai proses keberlanjutan yang cukup strategis, terutama dalam hal penyediaan kebutuhan pupuk kandang.

Untuk lokasi Bogor, ternyata usaha peternakan ruminansia kecil tidak mungkin dikembangkan karena lokasi tersebut merupakan daerah endemik anthraks. Dinas Peternakan tidak dibenarkan menganggarkan suatu bentuk kegiatan kecuali berkaitan dengan aspek kesehatan hewan seperti vaksinasi anthrax setiap enam bulan sekali. Tim PSEKP memfasilitasi pelatihan pemeliharaan ternak dan kesehatan hewan. Alternatif untuk menambah pendapatan keluarga dianjurkan melakukan diversifikasi usaha di luar subsektor peternakan.

Kegiatan membuat kerajinan yang dipelajari dari Laa Nona Galery di Cikaret, Cibinong, belum mampu memberi dampak secara finansial karena kesulitan menjajagi atau menciptakan pasar, kecuali mengikuti berbagai pameran baik di Jakarta maupun di Bogor. Fasilitasi pembuatan kerajinan telah mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka, disamping membuka wawasan yang lebih luas untuk ibu-ibu rumah tangga. Ketrampilan membuat barang-barang kerajinan rumah tangga perlu dimotivasi dan didukung oleh pemerintah setempat dengan menjajagi peluang pemasaran.

Ketiadaan modal usaha merupakan kendala yang paling sering dikeluhkan. Kegiatan keuangan mikro mendapat sambutan yang cukup antusias. Beberapa kelompok yang difasilitasi menunjukkan kemajuan baik dalam pertemuan kelompok, pembayaran cicilan pinjaman maupun dalam sistem administrasi yang berdampak pada peningkatan akumulasi modal dan kas kelompok serta peningkatan jumlah anggota dari tidak ada menjadi tujuh anggota.

Dampak kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak selamanya berupa fisik atau finansial, tetapi juga dalam berbagai aspek lainnya, seperti kesadaran untuk bekerja berkelompok, penambahan wawasan,

keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera, kemampuan mengemukakan pendapat di depan umum, mampu bekerja sama dengan pihak luar dan lain-lain. Perbaikan tingkat pendapatan sifatnya mengikuti. Kelompok yang dinilai mempunyai kinerja bagus tidak sulit untuk memperoleh sumber dana seperti Yayasan Kampung Ternak yang awalnya bermitra dalam penyediaan ternak peliharaan sampai akhirnya bisa difasilitasi dalam program CSR, sehingga domba yang dipelihara sudah menjadi milik peternak sebagai modal awal menambah pendapatan keluarga.

Salah satu pilar penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Pendampingan yang dilakukan belum optimal. Hal ini disebabkan minimnya pengalaman Tim dan alokasi anggaran yang kurang sesuai dengan jenis kegiatan. Pendampingan perlu dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan kelompok untuk memahami suatu kegiatan.

(9) Pengembangan Program Prima Tani

Tujuan Kegiatan :

- (1) Membantu BPTP (D.I.Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat) dalam pelaksanaan Prima Tani, khususnya dalam menyempurnakan hasil identifikasi permasalahan, menyempurnakan rancang bangun AIP, melakukan baseline survey, serta mengimplementasikan pengembangan kelembagaan;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prima Tani di ketiga lokasi;
- (3) Membantu dan menyempurnakan tahapan kegiatan implementasi Prima Tani untuk seluruh BPTP yang memerlukan pendampingan aspek sosial ekonomi pertanian;
- (4) Mempelajari dan merumuskan pembelajaran dari pelaksanaan Prima Tani di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Tengah.

Pendekatan Kegiatan

Pendampingan difokuskan kepada pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan, khususnya kelembagaan-kelembagaan yang tercakup dalam Laboratorium Agribisnis. Kegiatan terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

- (1) Pendampingan pelaksana lapangan dan masyarakat;
- (2) Workshop dengan berbagai pihak yang terlibat dalam Prima Tani;
- (3) Studi pembelajaran pelaksanaan Prima Tani 2005-2006 dalam rangka memperoleh masukan kritis untuk menyempurnakan konsep dan implementasi kegiatan Prima Tani di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Tengah.

Pendampingan Pelaksanaan Prima Tani

Di Provinsi D.I. Yogyakarta, tim memberi masukan dalam seminar proposal kegiatan BPTP tahun 2007, bersama Tim Teknis Primatani Pusat membantu mendiskusikan kelengkapan kegiatan dan menyusun laporan PRA serta terlibat dalam peresmian klinik agribisnis di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Di Provinsi Sulawesi Utara, tim melanjutkan studi pemahaman wilayah secara komprehensif dengan metode PRA serta merumuskan rancang bangun laboratorium agribisnis dan sosialisasi di kalangan Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendampingan melakukan sosialisasi dan pendampingan rancang bangun laboratorium agribisnis.

Workshop Pementapan Pelaksanaan Penyeliaan Kegiatan Prima Tani

Sepanjang tahun 2007 dilakukan dua kali workshop, yaitu Workshop pembekalan Pemandu Teknologi di bidang sosial ekonomi dan kelembagaan, serta workshop Pementapan Pelaksanaan Penyeliaan Kegiatan Prima Tani. Keduanya merupakan pembekalan dan menyamakan persepsi diantara para pelaksana tentang ruang lingkup dan materi pokok pengembangan Prima Tani.

Materi workshop "Pementapan Pelaksanaan Penyeliaan Kegiatan Prima Tani" meliputi : (1) Kegiatan penyeliaan dan perkembangannya; (2) Pengalaman penyeliaan Prima Tani oleh PSEKP di Provinsi D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara; (3) Pengalaman penyeliaan terhadap BPTP dalam kegiatan penelitian, pengkajian, dan diseminasi teknologi; (4) Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif; (5) Kebutuhan BPTP dalam kegiatan penyeliaan Prima Tani di Provinsi DI Yogyakarta; (6) Kebutuhan BPTP dalam kegiatan penyeliaan Prima Tani di Propinsi Nusa Tenggara Barat; dan (7) Kebutuhan BPTP dalam kegiatan penyeliaan Prima Tani di Propinsi Sulawesi Utara.

Pembelajaran Pelaksanaan Prima Tani 2005 di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Tengah

Hasil studi di Desa Siparepare (Provinsi Sumatera Utara) ditemukan bahwa kegiatan Prima Tani secara nyata baru dilakukan pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2005 digunakan untuk persiapan dalam bentuk sosialisasi, pemilihan lokasi, PRA dan Baseline Survey yang cukup menyita waktu. Prima Tani berhasil mengintroduksikan inovasi teknologi, membina dan memotivasi kelembagaan kelompok tani untuk bangkit dan menumbuhkan kelembagaan penunjangnya, sehingga mereka dapat mengadopsi inovasi komponen teknologi yang diperbaiki (PTT padi sawah) dan sudah mulai mengadopsi inovasi paket teknologi introduksi (seperti pengembangan semangka).

Di Kabupaten Magelang (Provinsi Jawa Tengah), disarankan adanya tindak lanjut untuk keberlanjutan usaha ternak sapi potong. Peternak hendaknya diberi keleluasaan memilih model usahatani ternak potong yang sesuai. Perlu diujicobakan model usaha ternak terpadu skala rumah tangga, karena kemungkinan besar skala rumah tangga lebih bisa diterima masyarakat petani secara luas, tentunya di bawah pembinaan Gapoktan sebagai lembaga usaha bersama.

Kasus pembelajaran di Bali, terlihat bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Prima Tani pada umumnya cukup tanggap dan baik. Prima Tani berhasil mengintroduksi inovasi teknologi, membina dan memotivasi kelembagaan kelompok tani untuk bangkit dan menumbuhkan kelembagaan penunjangnya, sehingga mereka dapat mengadopsi inovasi teknologi yang ditawarkan.

Di Kabupaten Parigi Moutong (Provinsi Sulawesi Tengah), langkah-langkah pengembangan dalam rancang bangun kelembagaan belum terakomodasi secara jelas. Perlu direncanakan kembali pengembangan penangkar benih padi yang telah mempunyai segmen pasar di lokasi Prima Tani. Keberhasilan dalam penerapan budaya produksi benih padi harus disertai dengan pengembangan kelembagaan produksi dan pemasarannya.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Dari ketiga provinsi lokasi penyeliaan PSEKP, yang seluruhnya mencakup 17 lokasi desa, sebagian besar merupakan tahun pertama kegiatan. Dengan demikian kegiatan pendampingan lebih fokus kepada penyusunan rancang bangun dan penyempurnaannya di lapangan. Penyusunan rancang bangun yang kurang didukung data dari pelaksanaan PRA yang memadai, menyebabkan materi dan strateginya tidak sesuai dengan kondisi lapangan secara memuaskan. Untuk itu, selain sosialisasi, diskusi dan respon masyarakat desa sebagai peserta kegiatan, sangat diperlukan untuk penyempurnaan rancang bangun yang disusun.

Kegiatan pembelajaran di empat lokasi Primatani tahun 2005 telah berhasil diungkap berbagai kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan. Adopsi teknologi belum berjalan secara memuaskan, dan secara umum sistematika pelaksanaan di lapangan cenderung kabur, terutama dalam target, strategi dan pencapaian adopsi teknologi inovasi maupun kelembagaan. Berbagai masukan yang diberikan langsung kepada petugas lapang, diharapkan dapat memperbaiki kinerja untuk masa selanjutnya.

5.6. Estimasi dan Proyeksi Indikator Pembangunan dan Input Utama Pertanian dan Pedesaan

(10) Panel Petani Nasional (PATANAS) : Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Penelitian PATANAS dirancang untuk memantau perubahan antar tahun berbagai aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di tingkat rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan yang berkembang di daerah pedesaan dengan tipe agro ekosistem yang berbeda. Tujuan penelitian adalah menganalisis berbagai perubahan sosial ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan. Aspek sosial ekonomi yang dianalisis pada tingkat rumah tangga meliputi : (1) Sumberdaya lahan; (2) Tenaga kerja pedesaan; (3) Pendapatan; (4) Kemiskinan; (5) Konsumsi pangan; (6) Teknologi pertanian; dan (7) Kelembagaan agribisnis.

Penguasaan Lahan Pertanian

Pada daerah berbasis agroekosistem lahan sawah, lahan sawah yang dimiliki petani di pedesaan Jawa mencapai 86 persen, sedangkan di pedesaan luar Jawa sebesar 64 persen. Namun sebaliknya lahan kebun yang dimiliki petani di Luar Jawa umumnya cukup luas yaitu sebesar 21,4 persen dari total lahan pertanian. Kelembagaan penguasaan lahan sawah non milik yang dominan terjadi di pedesaan Jawa adalah sistem sewa, sedangkan di luar Jawa sistem bagi hasil/sakap. Penguasaan lahan sawah telah terjadi ketimpangan distribusi baik di Jawa maupun di luar Jawa. Untuk kondisi di luar Jawa, sebesar 60 persen lahan sawah dikuasai hanya oleh sekitar 25 persen petani. Sementara di Jawa, sekitar 60 persen lahan sawah yang tersedia dikuasai oleh 17,6 persen petani.

Tenaga Kerja dan Kelembagaan Sistem Upah

Kondisi angkatan kerja ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,3 persen, partisipasi kerja 80,2 persen, kesempatan kerja 62 persen dan pengangguran sebesar 21,6 persen. Tingkat pengangguran di Jawa lebih rendah dibandingkan luar Jawa (21% vs 34 %). Jumlah angkatan kerja di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian sekitar 79 persen. Sebagian besar rumah tangga mencurahkan tenaga kerja untuk kegiatan usahatani sawah (30%), dagang dan buruh tani.

Sistem upah yang umum dilakukan adalah upah borongan (63,6%), kemudian upah harian (33,1%), dan sistem sambatan (3,3%). Rumah tangga di luar Jawa yang melakukan kegiatan usahatani dengan sistem borongan lebih besar daripada Jawa. Namun untuk sistem upah harian menunjukkan kebalikannya. Dominannya sistem upah borongan di luar Jawa disebabkan terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan

alat/mesin pertanian, waktu tanam yang singkat dengan ketersediaan air irigasi yang terbatas, pergeseran sistem upah berjalan lambat, dan mengurangi biaya konsumsi pekerja.

Struktur dan Distribusi Pendapatan

Sumber pendapatan utama rumah tangga berasal dari sektor pertanian (termasuk jasa dari asset produktif, yakni menyewakan tanah, ternak dan alat/mesin) terutama berasal dari usahatani padi sawah (antara 58,9–98,4%). Perbedaan sumbangan pendapatan sektor pertanian antar desa disebabkan oleh perbedaan ketersediaan sumberdaya lahan, ketersediaan kesempatan kerja dan kemudahan mobilitas penduduk. Sementara itu, pola hubungan pendapatan dari sektor pertanian dan luar pertanian bervariasi. Enam desa menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan dari pertanian dan luar pertanian, sedangkan delapan desa lainnya menunjukkan tidak ada hubungan antara keduanya.

Tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga petani termasuk dalam kategori rendah sampai sedang (nilai indeks Gini: 0,35-0,51). Luas penguasaan lahan termasuk ketimpangan rendah sampai berat (nilai indeks Gini: 0,27-0,57) dan pendapatan dari sektor pertanian termasuk ketimpangan rendah sampai berat. Tingkat ketimpangan pendapatan baik dari pertanian (on-farm), di luar usahatani (off-farm) dan non-pertanian (non-farm), maupun total pendapatan rumah tangga petani padi adalah merata di Jawa dan luar Jawa. Namun ketimpangan pendapatan total rumah tangga di Jawa lebih berat dibanding di luar Jawa.

Pengeluaran dan Tingkat Konsumsi Pangan

Pangsa pengeluaran pangan di luar Jawa sekitar 55 persen, sedangkan di Jawa sekitar 50-52 persen. Dengan memperhatikan pangsa pengeluaran pangannya, tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih baik dibandingkan dengan di provinsi lainnya. Pengeluaran pangan rumah tangga terbesar digunakan untuk pengeluaran makanan pokok yang termasuk dalam kelompok padi-padian. Pangsa pengeluaran padi-padian berkisar antara 22,4 persen (Jawa Barat) hingga 44,5 persen (Jawa Timur) untuk di Jawa, sedangkan di Luar Jawa berkisar antara 17,2 persen (Sumatera Utara) hingga 44,9 persen (Sulawesi Selatan). Kemudian diikuti dengan pengeluaran untuk tembakau/sirih dan pangan hewani. Sementara itu, pengeluaran nonpangan terbesar adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu berkisar 23,7 – 42,3% dari total pengeluaran bukan pangan, diikuti dengan pengeluaran untuk pendidikan. Pada daerah produsen padi, beras yang dikonsumsi sebagian besar dari produksi sendiri. Proporsi jumlah beras yang berasal dari dari produksi/hasil sendiri berkisar 38 – 63% di Jawa dan 53 – 94% di luar Jawa.

Ukuran Kemiskinan dan Strategi Antisipasinya

Berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, tidak ditemukan rumah tangga contoh termasuk kategori miskin, kecuali di Desa Kaligondo (Banyuwangi) terdapat 32 persen rumah tangga miskin. Namun dengan menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan ADB (US\$ 1/kapita/hari), sekitar 28 - 88% rumah tangga di luar Jawa dan 34 - 84% rumah tangga di Jawa termasuk kategori rumah tangga miskin. Sekitar 24-32% rumah tangga di Luar Jawa dan 12-18 % di Jawa pernah mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan dasar. Program penanggulangan kemiskinan yang dapat dinikmati oleh masyarakat adalah raskin, Bantuan langsung Tunai (BLT), Asuransi Kesehatan rakyat Miskin (Askeskin), dan SPP gratis serta fasilitas lain seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan ke sekolah tingkat SD dan SLTP.

Penerapan Teknologi Pertanian

Secara umum frekuensi penanaman padi dilakukan 1-3 kali dalam satu tahun. Pola tanam dominan dilakukan rumah tangga adalah padi-padi-bera, dan padi-padi-padi. Terdapat pola tanam padi-palawija, namun jumlahnya relatif sangat kecil. Penggunaan benih padi berlabel masih rendah, sebagian besar petani terutama di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan banyak yang menggunakan benih produksi sendiri atau benih hasil pertukaran antar petani.

Dalam usahatani padi, umumnya petani tidak melakukan pengolahan tanah secara sempurna yang meliputi kegiatan membajak, menggaru dan meratakan tanah. Pengolahan lahan menggunakan traktor, namun di Jawa juga ada yang menggunakan bajak sapi/kerbau. Penggunaan pompa air terutama untuk penanaman pada MK II (Kabupaten Sragen), sedangkan di Provinsi Jawa Barat, penggunaan pompa air pada MH dan MK I karena wilayah persawahannya tidak mendapat jatah air, meskipun berada di wilayah pengairan irigasi.

Kelembagaan Agribisnis

Input usahatani seperti pupuk, pestisida, herbisida, dan input lainnya tersedia di pasar dan petani dengan mudah membelinya dari pedagang input usahatani. Secara fisik aksesibilitas petani terhadap input usahatani yang dibutuhkan cukup baik, yakni selalu tersedia di pasar. Namun secara finansial aksesibilitas petani relatif rendah sehingga cukup banyak petani yang tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan input usahatani mereka dengan membeli secara tunai, terutama di luar Jawa. Konsekuensinya adalah sekitar 54 persen petani di luar Jawa dan sekitar 34 persen petani di Jawa selalu meminjam modal usahatani untuk memenuhi kebutuhan input usahatani mereka, terutama untuk

pembelian pupuk dan obat-obatan disamping untuk biaya pengolahan tanah. Modal usahatani tersebut sebagian besar dipinjam dari pedagang input usahatani atau penggilingan padi yang umumnya juga merangkap sebagai pedagang pembeli hasil panen petani. Cara pembayaran pinjaman modal tersebut dilakukan dengan menukar gabah hasil panen petani atau dibayar setelah panen tetapi dengan harga lebih tinggi dibanding harga pembelian secara tunai dengan perhitungan bunga yang lebih tinggi (4-5%/bulan) dibandingkan bank formal (2-3%/bulan).

Organisasi Kelompok Tani umumnya sudah dibentuk, sekitar 59 persen petani di Jawa mengetahui keberadaan Kelompok Tani, sedangkan di luar Jawa yang mengetahui keberadaan Kelompok Tani sebesar 86 persen. Namun hanya sebagian kecil petani yang menjadi anggota kelompok karena kurang merasakan manfaatnya. Selama tiga tahun terakhir, hanya sekitar 40 persen petani yang pernah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh PPL. Sekitar 90 persen kegiatan penyuluhan yang diikuti petani tersebut terkait dengan pelaksanaan program pertanian tertentu, artinya jika tidak ada kegiatan program pertanian maka tidak ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PPL. Kondisi ini dapat menimbulkan involusi teknologi dan kurang kondusif bagi upaya peningkatan produksi padi dan pendapatan petani melalui inovasi teknologi.

Implikasi Kebijakan

Agar terjadi diversifikasi pendapatan dan usaha serta mengurangi ketimpangan pendapatan rumah tangga, dapat dilakukan dengan memperbesar kesempatan kerja di sektor luar pertanian misalnya dengan pengembangan industri pedesaan. Selain itu juga perlu memperlancar mobilitas penduduk dan mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat ketersediaan lahan pertanian di wilayah pedesaan sudah semakin berkurang.

Dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, peran pemerintah dalam merubah konsumsi pangan masyarakat terutama beras dan mie sangat dominan. Untuk itu perlu peningkatan keragaman pangan dan pangan lokal serta peningkatan kualitas konsumsi pangan rumah tangga. Sebetulnya masyarakat sudah melakukan coping and adaptive mechanism dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, pemerintah dan swasta melalui CSR perlu terus memantau keadaan mereka dengan terus memperluas kesempatan kerja dan memperluas cakupan program kemiskinan.

Peningkatan produktivitas padi masih dapat dilakukan, namun masih diperlukan pembenahan terkait dengan penerapan teknologi pertanian, eksistensi dan fungsi kelembagaan permodalan dan pemasaran hasil, serta pemantauan harga gabah dan beras. Semua ini dapat dilakukan dan merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak

hanya pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah, tanggung jawab pemerintah daerah lebih besar dalam mewujudkan program tersebut.

(11) Analisis Penawaran dan Permintaan Pupuk di Indonesia 2007-2012

Pada tahun 2006 terjadi lonjakan harga dan langka pasok pupuk, terutama jenis Urea. Jika masalah tersebut terjadi secara berkepanjangan, dikhawatirkan ketahanan pangan nasional, produksi pertanian nasional, devisa negara dan pendapatan petani akan terganggu. Untuk itu penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran dan jumlah permintaan aktual pupuk di tingkat nasional; (2) Memproyeksikan penawaran, permintaan dan neraca pupuk untuk periode 2007-2012; (3) Mengidentifikasi perilaku petani dalam menggunakan pupuk; dan (4) Merumuskan kebijakan yang terkait dengan penawaran dan permintaan pupuk di masa mendatang.

Penawaran (Produksi) Pupuk 2007-2012

Sesuai dengan rencana jangka panjang produsen pupuk, produksi pupuk Urea diproyeksikan akan terus meningkat dari 5.654.682 ton pada tahun 2006 menjadi 7.740.000 ton pada tahun 2012. Kapasitas pabrik direncanakan baru akan ditambah pada tahun 2012 sehingga kapasitas pabrik akan meningkat dari 8,03 juta ton menjadi 8,60 juta ton. Produksi pupuk ZA diproyeksikan akan meningkat dari 625 ribu ton pada tahun 2006 menjadi 637 ribu ton per tahun selama 2007-2012. Di sisi lain, produksi pupuk SP-36 juga diproyeksikan akan meningkat dari 648.499 ton pada tahun 2006 menjadi 950.000 ton per tahun selama 2007-2012. Tidak ada rencana penambahan kapasitas pabrik selama periode 5 tahun ke depan untuk produksi pupuk ZA dan SP-36. Sedangkan produksi pupuk NPK diproyeksikan akan meningkat dari 412.663 ton pada tahun 2006 menjadi 2.646.000 ton pada tahun 2012. Ada rencana penambahan kapasitas pabrik NPK cukup besar selama periode 5 tahun ke depan.

Permintaan Pupuk di Sektor Pertanian

Variabel yang mempengaruhi permintaan masing-masing jenis pupuk secara signifikan dapat dilihat dalam Tabel 5.1. Apabila HET riil Urea dan SP-36 dipertahankan tetap seperti pada tahun 2006, maka HET nominal kedua jenis pupuk tersebut perlu dinaikkan 8,19 %/tahun. Permintaan Urea akan meningkat 2,16 %/tahun, sehingga pada tahun 2012 permintaan pupuk Urea akan menjadi sekitar 5,01 juta ton. Apabila HET riil ZA dipertahankan tetap seperti pada tahun 2006, maka HET nominal ZA perlu dinaikkan 8,19 %/tahun). Permintaan ZA akan meningkat 7,10 %/tahun sehingga pada tahun 2012 permintaan akan naik menjadi 831,5 ribu ton. Selanjutnya apabila HET riil NPK

dipertahankan tetap seperti pada tahun 2006, maka permintaan NPK akan meningkat 5,64%/tahun sehingga permintaan pada tahun 2012 akan menjadi sekitar 264,1 ribu ton (untuk mempertahankan HET riil tersebut, HET nominal NPK perlu dinaikkan 8,19%/tahun).

Tabel 5.1. Variabel yang Mempengaruhi Secara Signifikan terhadap Permintaan Pupuk, Menurut Jenis Pupuk

No.	Variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan pupuk	Jenis Pupuk			
		Urea	SP-36	ZA	NPK
1.	Luas areal tanaman pangan	+	+		+
2.	Luas areal tanaman hortikultura		+	+	
3.	Luas areal tanaman perkebunan		+	+	
4.	HET riil pupuk Urea	-	-		- *)
5.	HET riil pupuk SP-36	-	-		
6.	HET riil pupuk ZA			-	

Keterangan: + : pengaruh secara positif; - : pengaruh secara negatif
*) : HET riil pupuk NPK diproksi dari HET riil pupuk Urea.

Neraca Penawaran-Permintaan

Surplus produksi pupuk Urea akan terus meningkat pada semua skenario. Pada tahun 2012, produksi Urea akan mengalami surplus sekitar 1,27 juta ton (16,45%) jika HET riil Urea dan SP36 tidak dinaikkan (HET nominal dinaikkan 8,19%/tahun). Surplus produksi pupuk ZA akan terus menurun dan akhirnya terjadi defisit. Jika HET riil ZA tidak dinaikkan (HET nominal naik 8,19%/tahun) atau HET nominal naik 10%/tahun, defisit produksi sudah mulai terjadi pada tahun 2009. Surplus produksi pupuk SP-36 juga akan terus menurun. Jika HET riil SP-36 dan Urea tidak dinaikkan, maka defisit produksi mulai terjadi pada tahun 2010 sebesar 14.496 ton (1,53%) dan terus meningkat menjadi 196.398 ton (20,67%) pada tahun 2012. Sedangkan surplus produksi pupuk NPK akan terus meningkat selama 2007-2012. Makin tinggi kenaikan HET nominal NPK, makin besar pula surplus produksi. Jika HET nominal NPK naik 8,19% (HET riil tetap), 10% atau 15%/tahun, maka surplus produksi pada tahun 2012 adalah 2,68 juta ton (91,02%), 2,69 juta ton (91,40%), dan 2,72 juta ton (92,59%).

Perilaku Petani dalam Menggunakan Pupuk

Pada komoditas tanaman pangan (padi dan jagung hibrida), di daerah yang aksesibilitasnya terhadap sumber pupuk kurang baik (Sumatera Barat) petani menggunakan takaran pupuk per hektar jauh lebih rendah dari takaran rekomendasi nasional, sedangkan di daerah

yang aksesibilitasnya lebih baik (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) melebihi takaran rekomendasi. Selain itu petani di Sumatera Barat membayar harga pupuk jauh di atas HET. Pada tanaman hortikultura (kentang, kubis dan bawang merah), petani umumnya menggunakan pupuk lebih banyak dari yang dianjurkan. Petani umumnya membayar harga pupuk di atas HET, terutama NPK. Pada tanaman perkebunan (kelapa sawit, tebu, tembakau), petani menggunakan takaran pupuk per hektar cukup besar. Petani kelapa sawit di Sumatera Utara dan petani tembakau di Jawa Timur membayar harga pupuk di atas HET, terutama NPK, sedangkan petani tebu di Jawa Timur membayar sama atau sedikit di atas HET. Faktor yang paling kuat mempengaruhi petani dalam menentukan takaran pupuk per hektar adalah kondisi tanaman, kebiasaan petani, dan kemampuan modal petani, sedangkan faktor ekonomi seperti harga pupuk, harga harapan hasil panen dan biaya selain pupuk, kurang dipertimbangkan petani. Pada komoditas perikanan (tambak ikan dan udang), takaran penggunaan pupuk pada tambak udang di Jawa Timur jauh lebih besar dibanding pada tambak ikan bandeng di Jawa Barat.

Implikasi Kebijakan

Untuk mengurangi beban pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk, maka HET nominal perlu dinaikkan maksimum 8 persen per tahun agar pemakaian pupuk, terutama Urea, tidak turun. Tetapi jika kenaikan itu mencapai 10 persen per tahun, maka dampaknya bagi petani akan signifikan. Jika ini terjadi, maka ketahanan pangan nasional dan produksi nasional pertanian akan turun karena menurunnya produktivitas, walaupun luas areal cenderung meningkat.

Pemerintah perlu mengantisipasi kebutuhan gas bumi untuk pabrik pupuk karena kelangkaan pasokan gas akan menjadi faktor penghambat krusial bagi kelangsungan hidup pabrik pupuk nitrogen. Berkaitan dengan itu, maka kontrak-kontrak penjualan gas oleh produsen gas dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka kecukupan pasokan gas ke pabrik pupuk perlu lebih diutamakan (sebagai kewajiban layanan publik, Public Service Obligation). Jika pasokan gas terganggu, maka produksi pupuk terganggu, sehingga ketahanan pangan nasional terganggu, yang akhirnya berujung pada lemahnya ekonomi nasional.

VI. PENDAYAGUNAAN HASIL ANALISIS DAN KERJASAMA PENELITIAN

6.1. Publikasi Hasil-Hasil Penelitian

Sebagai lembaga penelitian sosial ekonomi pertanian dan analisis kebijakan, PSEKP telah menerbitkan hasil kegiatan penelitian dan analisis para peneliti kepada publik atau pengguna (users). Publikasi dinilai sangat efektif dalam penyebarluasan hasil penelitian karena dapat mencapai khalayak secara luas, dapat bertahan dalam jangka panjang, serta memungkinkan untuk dibaca dan ditelaah secara berulang-ulang. Kegiatan publikasi hasil penelitian dan analisis sosial ekonomi pertanian merupakan aktivitas rutin yang dilakukan PSEKP setiap tahun.

Pada tahun anggaran 2007 PSEKP telah menerbitkan 7 jenis publikasi sebagai berikut:

(1) Jurnal Agro Ekonomi

Jurnal Agro Ekonomi (JAE) terbit dua kali setahun dan dicetak masing-masing 300 eksemplar untuk setiap nomor terbitan. JAE merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian primer sosial ekonomi pertanian dan dimaksudkan sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional para ahli sosial ekonomi pertanian serta informasi bagi pengambil kebijakan, pelaku dan pemerhati pembangunan pertanian dan pedesaan. Tabel 6.1. menyajikan judul-judul dan penulis naskah JAE Vol. 25, No. 1 dan 2 yang diterbitkan oleh PSEKP pada tahun 2007.

Tabel 6. 1. Judul dan Penulis Naskah JAE tahun 2007

No.	Judul	Penulis
	JAE Vol. 25 No. 1, Mei 2007	
1.	Pengaruh Desain Pesan Video Instruksional terhadap Peningkatan Pengetahuan Petani tentang Pupuk Agrodyke	Aida Vitayala S. Hubeis
2.	Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan: Analisis Simulasi Kebijakan dengan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi	Sri Hery Susilowaty, Bonar M. Sinaga, Wilson H. Limbong, dan Erwidodo
3.	Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro	Nyak Ilham dan Hermanto Siregar
4.	Uji Keberadaan Integrasi Pasar Beras di Bengkulu	Andi Irawan dan Dewi Rosmayanti
5.	Dampak Penurunan Bantuan Domestik Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia: Analisis Simulasi Perdagangan	Helena J. Purba, Budiman Hutabarat, dan Sri Nuryanti

No.	Judul	Penulis
	JAE Vol. 25 No. 2, Oktober 2007	
1.	Analisis Keberlanjutan Perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan	Thamrin, Surjono, H. Suthahjo, Catur Herison dan Supiandi Sabiham
2.	Peran Industri Berbasis Perkebunan dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan: Pendekatan Social Accounting Matrix	Wayan R. Susila dan IDM Darma Setiawan.
3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Perintis Manajemen Irigasi Produktif	Sumaryanto
4.	Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani Sayuran pada Kondisi Risiko Produksi dan Harga di Kecamatan Pangalengan Kabupten Bandung	Anna Fariyanti, Kuntjoro, Sri Hartoyo dan Arief Daryanto
5.	Impact of Domestic Rice Procurement Policy on Producer Welfare in Bangladesh Agriculture: An Econometric Analysis	Mohammad A. Ashraf

(2) Forum Agro Ekonomi

Forum Agro Ekonomi (FAE) terbit dua kali setahun dan dicetak sebanyak 300 eksemplar untuk setiap nomor terbitan. FAE merupakan publikasi ilmiah yang memuat critical review hasil penelitian sosial ekonomi pertanian dan juga menampung naskah-naskah yang berupa gagasan-gagasan ataupun konsepsi-konsepsi orisinal dalam bidang sosial dan ekonomi pertanian. Judul-judul dan penulis naskah FAE Vol. 25, No. 1 dan 2 yang diterbitkan oleh PSEKP pada tahun 2007 disajikan pada Tabel 6. 2.

Tabel 6.2. Judul dan Penulis Naskah FAE tahun 2007

No.	Judul	Penulis
	FAE Vol. 25 No. 1, Juli 2007	
1.	Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional	Pantjar Simatupang
2.	Status Gagasan Tentang Peternakan Masa Depan dan Strategi Mewujudkannya	Yusmichad Yusdja dan Nyak Ilham
3.	Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keperpihakan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan	Roosganda Elizabeth
4.	Perkembangan Pasar KOPI Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia	Reni Kustiari
5.	Aturan dan Mekanisme Perlindungan Terhadap Dampak Liberalisasi Perdagangan untuk Siapa	Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto

No.	Judul	Penulis
	FAE Vol. 25 No. 2, Desember 2007	
1.	Efisiensi dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian	Muhammad Iqbal, Edi Basuno dan Gelar Satya Budhi
2.	Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia	Sumaryanto dan A.R. Nurmanaf
3.	Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI dan Primatani	Syahyuti
4.	Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat	Gontom C. Kifli
5.	Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan	Roosganda Elizabeth
6.	Gagasan Pembangunan Berbasis Kualitas Penduduk dan Tata Nilai Sosio-Budaya	Tri Pranadji

(3) Analisis Kebijakan Pertanian

Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) terbit empat kali setahun dan dicetak masing-masing 300 eksemplar untuk setiap nomor terbitan. AKP adalah media ilmiah yang membahas isu aktual kebijakan pertanian yang memuat artikel analisis kebijakan pertanian dalam bentuk gagasan, dialog dan polemik. Judul-judul dan penulis naskah AKP Vol. 5, No. 1, 2, 3, dan 4 yang diterbitkan oleh PSEKP pada tahun 2007 disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Judul dan Penulis Naskah AKP tahun 2007

No.	Judul	Penulis
	AKP Vol. 5 No. 1, Maret 2007	
1.	Restrukturisasi Peternakan di Indonesia	Chalid Talib, Ismeth Inounu dan Abdullah Bamualim
2.	Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan	Syahyuti
3.	Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi melalui Efisiensi Pemanfaatan Lahan Sawah di Indonesia	Dewa K.S. Swastika, J. Wargiono, Soejitno dan A. Hasanuddin
4.	Developing of Small and Medium Enterprises for Poverty Alleviation in Indonesia: Lesson Learned from OTOP Program in Thailand	Sahat M. Pasaribu
5.	Usulan HET Pupuk Berdasarkan Tingkat Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah	Ketut Kariyasa
6.	Cuplikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plan Genetic Resources for Food and Agriculture	Suplemen

No.	Judul	Penulis
AKP Vol. 5 No. 2, Juni 2007		
1.	Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani	A.Rozany Nurmanaf
2.	Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani di Sumatera Selatan	Hermanto R.
3.	Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional	Effendi Pasandaran
4.	Analisis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM): Kasus Pengembangan Usaha Ternak Sapi di Propinsi Sulawesi Selatan	Edi Basuno dan Rita Nur Suhaeti
5.	Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat	Muhammad Iqbal dan Sumaryanto
6.	Cuplikan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2007	Suplemen
AKP Vol. 5 No. 3, September 2007		
1.	Usulan Kebijakan Beras dari Bank Dunia: Resep yang Keliru	M. Husein Sawit
2.	Bantuan Domestik (Domestic Support): Salah satu Pilar Utama Perundingan Pertanian pada WTO	Erna M. Lokollo
3.	Beras dan Jebakan Kepentingan Jangka Pendek	Erizal Jamal, E. Ariningsih, Hendiarto, K. M. Noekman dan Andi Askin
4.	Revitalizing Institutions to Enhance Climate Forecast Application in East Nusa Tenggara Province, Indonesia	Sahat M. Pasaribu
5.	Kebijakan Pembangunan Bahan Bakar Nabati (Jarak Pagar) di Maluku	Sjahrul Bustaman
6.	The Features of Vegetables in Indonesia and the Current Policy in the Framework of Agricultural Development	Mohamad Maulana and Bambang Sayaka
7.	Cuplikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)	Suplemen

No.	Judul	Penulis
	AKP Vol. 5 No. 4 , Desember 2007	
1.	Fenomena dan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat	Muhammad Iqbal
2.	Usulan Kebijakan Pola Pemberian dan Pendistribusian Benih Bersubsidi	Ketut Kariyasa
3.	Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Investasi Infrastruktur untuk Peningkatan Partisipasi dan Pendapatan Petani	Herman Supriadi dan Roosganda Elizabeth
4.	Alternatif Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan PDB Subsektor Peternakan di Indonesia	Nyak Ilham
5.	Fluktuasi Harga, Transmisi Harga dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah	Bambang Irawan
6.	Cuplikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan	Suplemen

(4) Working Paper

Working Paper (WP) adalah publikasi cetak yang memuat tulisan ilmiah peneliti PSEKP mengenai hasil penelitian, gagasan ilmiah, opini, pengembangan metodologi, pengembangan alat analisis, argumentasi kebijakan, pandangan ilmiah dan review hasil penelitian. Judul-judul dan penulis naskah WP No. 89 s/d 91 yang diterbitkan oleh PSEKP pada tahun 2007 disajikan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Daftar Judul dan Penulis Naskah Working Paper yang Terbit Tahun 2007

No. Terbit	Judul Naskah	Penulis
WP 89	Budidaya, Analisis Usahatani dan Kemitraan Stroberi di Tabanan, Bali	Valeriana Darwis
WP 90	Profil Sosial Ekonomi Petani pada Lokasi P4MI di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Muh. Iqbal dan Iwan Setiajie Anugrah
WP 91	Diskripsi Keragaan Sosial Ekonomi Petani pada Lokasi P4MI di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur	Muh. Iqbal dan Rudy S. Rivai
WP 92	Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi Pengendaliannya di Provinsi Sumatera Selatan	Muh. Iqbal

(5) Buku Tematik

Buku Tematik terbit satu kali setahun. Pada tahun 2007, telah diterbitkan 3 topik dan dicetak masing-masing 300 eksemplar, disajikan pada Tabel 6.5.

Tabel 6. 5. Judul dan Penulis Naskah Tematik yang Terbit Tahun 2007

No. Terbit	Judul Naskah	Penulis
1.	Analisis Notifikasi dan Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO	Budiman Hutabarat, Saktyanu K.D., Helena J. Purba, Erna Maria Lokollo dan Wahida
2.	Wilayah Rawan pangan dan Gizi Kronis di Papua, Kalimantan Barat dan Jawa Barat	Mewa Ariani, Handewi P. Saliem, Gatoet Sroe . Hardono dan Tri Bastuti P.
3.	Kaji Tindak Pemberdayaan Petani di Daerah Tertinggal	Edi Basuno, Rita Nur Suhaeti, Gelar Satya Budhi dan M. Iqbal

(6) Prosiding

Pada tahun 2007 PSEKP telah menerbitkan 2 prosiding dan setiap prosiding dicetak sebanyak 300 eksemplar. Prosiding merupakan publikasi yang diterbitkan tidak berkala. Prosiding berisi karya tulis yang pernah diseminarkan pada seminar nasional dan seminar khusus yang dilaksanakan oleh PSEKP. Judul-judul dan penulis naskah Prosiding pada tahun 2007 disajikan pada Tabel 6.6. dan 6.7.

Tabel 6.6. Judul dan Penulis Naskah Prosiding “Kinerja dan Prospek Pembangunan Pertanian Indonesia”

No.	Judul	Penulis
1.	Kinerja dan Masa Depan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan	D.K.S. Swastika, J. Wargiono, B. Sayaka, A. Agustian dan V. Darwis
2.	Posisi dan Masa Depan Pembangunan Perkebunan Indonesia	Prajogo U. Hadi, Supriyati, Amar K. Zakaria, Tjetjep Nurasa, Frans B.M Dabukke dan Ening Ariningsih
3.	Pembangunan Peternakan: Pencapaian dan Prospek	Yusmichad Y., Rosmijati S., Sri Wahyuning K.S., Ikin S, Nyak Ilham dan Yulia F. Sinuraya

No.	Judul	Penulis
4.	Kinerja dan Prospek Pembangunan Hortikultura	Bambang Irawan, Herlina Tarigan, Budi Wiryono, Juni H. dan Ashari
5.	Indikator Makro Sektor Pertanian	Nizwar Syafa'at, Adreng Purwoto, Saktyanu, K.D., Ketut Karyasa, M. Maulana dan Pantjar Simatupang
6.	Status dan Arah pengembangan Kelembagaan Petani	Kedi Suradisastra, Edi Basuno dan Herlina Tarigan
7.	Kesejahteraan dan Pemikiran Penanggulangan Kemiskinan Petani	I Wayan Rusastra, Mewa Ariani dan Handewi P. Saliem

Tabel 6.7. Judul dan Penulis Naskah Prosiding Seminar Nasional “Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan : Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat”

No.	Judul	Penulis
I.	Makalah Utama	
1.	Peran Pertanian Dalam Ekonomi Perdesaan	Dr. Harianto (FEM- IPB)
2.	Kinerja dan Perspektif Kegiatan Non Pertanian Dalam Ekonomi Perdesaan	Dr. Kecuk Suhariyanto (Badan Pusat Statistik)
3.	Pengembangan Komoditas Bernilai Tinggi (High Value Commodity) Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani	Dr. Ronnie R. Natawidjaja, (CAPAS-UNPAD)
II.	Makalah Penunjang:	
	A. Kebijakan Dalam Perekonomian Pertanian dan Perdesaan	
4.	Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan	Rachmat Hendayana dan Syahrul Bustaman
5.	Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan	Iwan Setiajie A. dan Erma Suryani
6.	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai Dengan Kebijakan Tarif Optimal	Sri Nuryanti dan Reni Kustiari
7.	Analisis Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju Terhadap Produksi Pertanian Indonesia	Saktyanu K. Dermoredjo, Wahida, dan Budiman Hutabarat
8.	Analisa Dampak Penurunan Bantuan Domestik Negara Maju Terhadap Harga dan Penggunaan Sumberdaya Pertanian Indonesia	Helena J. Purba, Erna M. Lokollo dan Budiman Hutabarat
9.	Peran Sektor Pertanian Dalam Pendapatan Rumah Tangga	Erna M.Lokollo dan Supena Friyatno
10.	Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan Melalui Pengembangan Komoditas Bernilai Tinggi	Handewi P.Saliem dan Supriyati

No.	Judul	Penulis
B. Agroindustri dan Ekonomi Masyarakat Perdesaan		
11.	Peranan Agroindustri Perdesaan Dalam Perekonomian dan Perspektif Pengembangannya	Supriyati
12.	Peran Sektor Agroindustri Dalam Perekonomian Nasional dan Pendapatan Rumah Tangga Pertanian	Sri Hery Susilowati
13.	Strategi Memotivasi Profesionalisme Peternak Sapi Potong Rakyat: Analisis Peran dan Finansial Agen Rantai Pasok	Sri Wahyuni
14.	Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Agroindustri Pisang Di Kabupaten Lumajang	Herlina Tarigan
15.	Peluang dan Kendala Pengembangan Agroindustri Sagu Di Kabupaten Jayapura	Herlina Tarigan dan Ening Ariningsih
16.	Intensitas Pengembangan Ternak Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Bambang Winarso
C. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berkelanjutan		
17.	Dinamika Partisipasi Petani Padi Sawah Peserta Program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Di Jawa Barat	Supadi
18.	Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai	Roosganda Elizabeth
19.	Keragaan dan Kendala Pembiayaan Usahatani Ternak Sapi	Sugiarto dan Budi Wiryono
20.	Analisis Tingkat Penerapan dan Manfaat Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Usahatani Lada di Provinsi Bangka Belitung	Adang Agustian dan Budiman Hutabarat
21.	Budidaya Padi Ekologis Berbasis Partisipasi Masyarakat : Laporan Selang Pandang Upaya Memotivasi Petani Dalam Menggerakkan Pertanian Perdesaan	Iwan Setiajie Anugrah
22.	Dibutuhkan Dukungan Kebijakan Untuk Mengoptimalkan Peran Pedagang Hasil-Hasil Pertanian	Syahyuti

(7) Penerbitan Agro-Socioeconomic Newsletter

Newsletter ini merupakan media pertama di PSEKP yang ditulis menggunakan bahasa Inggris. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2007 dengan frekuensi 6 kali dalam satu tahun. Setiap terbitan dicetak sebanyak 300 eksemplar. Newsletter volume 1 Nomor 1 diterbitkan mulai bulan Februari, dan selanjutnya selang dua bulan sekali. Terbitan memuat 8 halaman dengan penampilan berwarna (full colour).

Media ini diterbitkan dalam upaya memperluas jangkauan pembaca, baik untuk kalangan dalam negeri maupun berbagai mitra dan lembaga riset serta lembaga pemerintahan di luar negeri. Karena itu, untuk setiap terbitan, media ini disebarakan ke berbagai lembaga pemerintah, kalangan perguruan tinggi, lembaga riset lain, swasta, dan lain-lain. Untuk kalangan luar negeri, media ini dapat diakses melalui website (www.pse.litbang.deptan.go.id).

Newsletter memuat informasi yang terbaru dan aktual. Harapannya adalah agar pembaca dapat mengetahui informasi paling baru serta memperoleh respon dari kalangan pembaca secara cepat. Topik-topik utama yang selalu hadir dalam setiap terbitan yaitu: temuan-temuan penelitian yang menarik (research findings), tinjauan terhadap kebijakan pemerintah yang terbaru tentang pembangunan pertanian (recent policy development), kegiatan penelitian di PSEKP (research activities), serta berita seputar lembaga PSEKP (ICASEPS news). Tabel 6.8 menyajikan daftar isi terbitan Newsletter tahun 2007.

Tabel 6.8. Daftar Isi Terbitan Newsletter PSEKP Tahun 2007

Volume, Nomor, Bulan Terbit dan Daftar Isi
Vol. 1 No. 1 February 2007
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Notifications and Modality Frameworks of the Agriculture Agreement in the WTO 2. Increasing Rice Production by Two Million Tons in 2007: Opportunity and Challenge 3. National Seminar on Agricultural Development in 2006 and Its Prospect in 2007 4. ICASEPS Research Activities in 2007 5. ICASEPS Collaborations with International Organizations 6. ICASEPS-JBIC Research Collaboration 7. What is ICASEPS? 8. Welcome Colleagues 9. Current Management In-Charge at the ICASEPS 10. ICASEPS Publications
Vol. 1 No. 2 April 2007
<ol style="list-style-type: none"> 1. Coping with Illegal Sugar in Indonesia: Key Points for Policy Instrument 2. The Policy of Increasing Benefits and Value-Added of Goat and Sheep Production 3. Indonesia and G-33 in the Agricultural Negotiation of the WTO 4. Collaboration between ICASEPS and IFC-SADI 5. ICASEPS Publications 6. Brief Profile 7. Welcome Colleague 8. Participation in AusAID's Leadership Fellowship Award (ALA) for Agricultural Cooperation Program with Indonesia 9. Participation in Agricultural Trade Training 10. Professional Discussion between JBIC and Its Stakeholders 11. The 8-Team 12. Discussion on Farmer's Term of Trade 13. Monitoring and Evaluation of Internal Research Activity at ICASEPS 14. Database Improvement

Volume, Nomor, Bulan Terbit dan Daftar Isi

Vol. 1 No. 3 June 2007

1. Analysis of Seed System of Food and Estate Crops
2. Valuation of Operation and Maintenance Performance of Irrigation Networks and Its Improvement Strategy
3. Development of Increasing Rice Production Program
4. Policy to Create "Permanent Agricultural Land"
5. "Prima Tani" and "Panca Yasa"
6. A Study on Wholesale Markets for Fresh Fruits and Vegetables
7. Development Policies and Empowerment of Agricultural Institution
8. ICASEPS Publications
9. Consultation Meeting of WTO
10. Brief Profile

Vol. 1 No. 4 August 2007

1. Action Research on Strengthening Agriculture Community of Less-Developed Areas
2. Study on Value-Added Improvement through Agro industry Development in Rural Areas
3. Revitalizing Agricultural Extension
4. Collaborative Research on Avian Influenza
5. Working Paper
6. Seminar Activities
7. Brief Profile
8. Welcome Colleague

Vol. 1 No. 5 October 2007

1. Analysis of Livestock Supply Chain Partnership
2. Rural Self-Support Program in Energy
3. Primatani
4. International Conference on Poverty Alleviation
5. Avian Influenza (AI) Research Update
6. Publication
7. Training Results from Australia
8. Increasing the Role of Agricultural Sector in Poverty Alleviation
9. Brief Profile

Vol. 1 No. 6 December 2007

1. Analisis of Micro Finance System to Support Farm Business in Rural Areas
 2. Analisis of Farmers and Agricultural Profile in Indonesia
 3. Pro-Poor Policy Formulation, Dialogue and Implementation at the Country Level
 4. Collaborative Study
 5. Publications
 6. ICASEPS' Seminar and Workshop
 7. Brief Profile
-

(8) Booklet dan Leaflet

Merupakan media publikasi PSEKP yang diterbitkan secara berkala, untuk memenuhi bahan materi PSEKP dalam berbagai kegiatan internal maupun dalam even-even nasional, seminar, pameran serta kegiatan-kegiatan diseminasi lainnya. Media booklet dan leaflet yang dicetak pada tahun 2007, berdasarkan materi yang disampaikan lebih kearah introduksi dan ekspose tentang perkembangan dan informasi

tentang kinerja PSEKP selama tahun berjalan hingga tahun 2007, sesuai perkembangan data dan informasi yang ada di PSEKP.

Untuk tahun 2007 penerbitan booklet dilaksanakan dalam versi bahasa Indonesia, dengan jumlah 250 eksemplar. Sementara leaflet yang dicetak pada tahun yang sama adalah tentang profil PSEKP, kemudian tentang Website dan leaflet yang terkait dengan kegiatan seminar nasional pembangunan pertanian dan perdesaan tanggal 4 Desember 2007. Jumlah leaflet yang dicetak masing-masing 500 eksemplar dan sebagian besar telah didistribusikan.

(9) Pendistribusian

Berbagai jenis publikasi yang telah dihasilkan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian disebarluaskan ke berbagai instansi terkait seperti Puslitbang komoditas, Balai Nasional dan BPTP lingkup Badan Litbang Pertanian, Ditjen Teknis lingkup Departemen Pertanian, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi Swasta/Praktisi. Pendistribusian publikasi PSEKP selain dikirim via pos, juga dilakukan secara langsung atau melalui tamu-tamu yang datang secara resmi dan membutuhkan buku-buku publikasi ke Sub Bidang Pendayagunaan Hasil Analisis. Wilayah distribusi publikasi PSEKP dapat dilihat pada Tabel. 6.9.

Publikasi ilmiah PSEKP dapat dihasilkan melalui kerjasama antara penulis naskah dan Dewan Redaksi, seluruh bahan tulisan dilakukan seleksi oleh Dewan Redaksi untuk terbitan JAE, FAE, dan AKP. Dewan Redaksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian (Tabel 6.10.)

Tabel 6.9. Distribusi Publikasi Ilmiah

Jenis Publikasi	Distribusi
1. JAE	Ditjen dan Badan Lingkup Deptan, Puslitbang, BPTP, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi Swasta, dan lain-lain
2. FAE	Ditjen dan Badan Lingkup Deptan, Puslitbang, BPTP, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi Swasta, dan lain-lain
3. AKP	Ditjen dan Badan Lingkup Deptan, Puslitbang, BPTP, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi Swasta, dan lain-lain
4. Working Paper	Penulis dan Perpustakaan PSEKP
5. Tematik	Ditjen dan Badan Lingkup Deptan, Puslitbang, BPTP, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi Swasta, dan lain-lain
6. Newsletter	Staf Ahli Menteri, Ditjen dan Badan Lingkup Deptan, Puslitbang, BPTP, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi Swasta, dan lain-lain

Tabel 6.10. Susunan Dewan Redaksi JAE, FAE, dan AKP Tahun 2007

No	Keputusan Kepala Badan Nomor:	Terbitan	Nama Dewan Redaksi
1.	32/Kpts/OT.160/J/2/1996	JAE	1. Dr. Budiman Hutabarat (Ketua) 2. Dr. Parulian Hutagaol (anggota) 3. Dr. Nizwar Syafa'at (anggota) 4. Drs Prajogo U. Hadi, M.Ec (anggota) 5. Dr. Bambang Irawan (anggota)
2.	26/Kpts/OT.160/J/2/1996	FAE	1. Dr. Rozany Nurmanaf (ketua) 2. Dr. Tri Pranadji (anggota) 3. Ir. Saptana, MSi (anggota) 4. Dr. Handewi P. Saliem (anggota) 5. Dr. Sumaryanto (anggota)
3.	28/Kpts/OT.160/J/2/1996	AKP	1. Dr. Yusmichad Yusdja (ketua) 2. Dr. Edi Basuno (anggota) 3. Dr. Dewa K.S. Swastika (anggota) 4. Dr. Bambang Sayaka (anggota) 5. Dr. Erizal Jamal (anggota)
4.	27/Kpts/OT.160/J/2/1996	Tematik	1. Prof. Dr. Pantjar Simatupang (Ketua) 2. Prof Dr. Kedi Suradisastra (anggota) 3. Dr. Yusmichad Yusdja (anggota) 4. Prof. Dr. Bonar Sinaga (anggota) 5. Dr. Felix Sitorus (anggota)

6.2. Komunikasi dan Dokumentasi Hasil Penelitian

Hasil-hasil penelitian Badan Litbang Pertanian (termasuk PSEKP) baru akan memiliki makna dan manfaat setelah sampai kepada para stakeholder atau pengguna. Oleh karena itu kegiatan komunikasi (mulai dari pengolahan sampai penyebarluasan hasil penelitian) memegang peranan sangat penting. Dalam penyelenggaraan komunikasi, perlu juga didukung dengan pendokumentasian yang baik. Pendokumentasian dapat berupa pengabdian suatu peristiwa/momen kegiatan komunikasi atau manajemen kearsipan bahan-bahan komunikasi.

Pada tahun Anggaran 2007 kegiatan komunikasi dan dokumentasi penelitian yang dilaksanakan PSEKP; (1) Seminar rutin dan seminar hasil penelitian 2007; (2) Seminar Nasional 2007; (3) Partisipasi dalam pameran/ekspose inovasi teknologi; (4) Rapat Dewan Redaksi; (5) Pembuatan website; (6) Dokumentasi; dan (7) Penyebaran publikasi.

6.2.1. Seminar

Pada tahun 2007 PSEKP telah menyelenggarakan berbagai seminar: yang diantaranya adalah Seminar Rutin, Seminar Hasil Penelitian, dan Seminar Nasional. Seminar-seminar tersebut dimaksudkan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan serta untuk mendapatkan umpan balik atau masukan dari para

stakeholder. Khusus Seminar Rutin, selain untuk mencari masukan dari stakeholder, juga dijadikan sebagai media menumbuhkan “budaya ilmiah” di PSEKP sebagai salah satu lembaga penelitian. Tabel 6.11. menyajikan judul-judul makalah seminar rutin dan pembicaranya.

Tabel 6.11. Judul Makalah dan Pembicara pada Seminar Rutin tahun 2007

No.	Tanggal	Judul Makalah	Pembicara
1.	15-3-07	Nilai Tukar Petani	1.Prof.Dr. Pantjar Simatupang (PSEKP) 2.Dr. Ali Rosidi (BPS)
2.	5-4-07	Indonesia dan G.33 dalam Perundingan Pertanian WTO	Dr. Erna M.Lokolo (PSEKP)
3.	18-4-07	Agriculture Trade “Poverty Reduction and Indonesia Export Competitiveness High Value Product	Prof Dr. Randy Stringer (Adelaide University, Australia)
4.	25-5-07	Daftar Jurnal Elektronik Online yang dilanggan PUSTAKA “Database Majalah Ilmiah Elektronik Fulltext	Tim dari PUSTAKA
5.	18-s/d 20 Juni 07	TOT Participatory Prospective Analysis (PPA)	Dr. Robin Bourgeois (ESCAP-CAPSA)
6.	16-7-07	Metode dan Hasil TOT Participatory Prospective Analysis (PPA)	Dr. Robin Bourgeois (ESCAP-CAPSA)
7.	26-7-07	Achieving Economic Benefits Through Agricultural Trade Reforms in Indonesia dan Trends in Australian’s Farm Composition and Stuctural Adjusment Tools	Ir. Saktyanu K.D., MSi (PSEKP)
8.	15-8-07	Climate Policy : Pro-Poor Mitigation Through Carbon Trading	Dr. Mark W Rosegrant (IFPRI)

Beberapa seminar tertentu melibatkan tim pembahas yang berasal dari luar PSEKP, baik kalangan birokrat maupun akademisi. Tujuan seminar tersebut adalah untuk mendapat masukan dari pembahas dan peserta, sekaligus sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kepada stakeholder. Daftar judul makalah dan pembicara dalam seminar nasional yang dilakukan PSEKP pada TA. 2007 dapat dilihat pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12. Judul Makalah dan Pembicara pada Seminar Nasional tahun 2007

No.	Tanggal	Judul Makalah	Pembicara
1.		Land and Household Economy 1970-2005: Changing Roads for Poverty Reduction	
	25-6-07	- Dampak Sertifikasi Tanah Terhadap Pasar Tanah dan Kepemilikan Tanah Skala Kecil (Effects of The Land Certification Project on the Land Market and Smallholders)	Dr. Risnarto MS (BPN)
		- Family and Life Histories (Team Karangobar 2007)	Dr. J.W Taco Bottema Hasrat Madyadipura
		- Land and Household Economy : Analysis of National Panel Survey	Dr. A. Rozany & Dr. Bambang Irawan (PSEKP)
		- Land and Household Economy : Analysis of Agricultural Census 1983-2003	Dr. I Wayan Rusastra (UNESCAP-CAPSA/ PSEKP)
		- Pathway Out of Rural Poverty : The Role of Land Labor Markets in Three East Java Villages (1969 to 2006)	Dr. William L. Collier
		- A Brief Quarter Century Overview of Indonesia's Agrarian Policies	Prof . Tjondronegoro (IPB)
		- Recent Agrarian History in Indonesia	Gunawan Wiradi M.Sc (IPB)
2.		Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan	
	21-8-07	- Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Faktor-faktor Penyebabnya	Dr. Sunaryo Urip (BP)
		- Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin	Dr. I Wayan Rusastra & Dr. Togar Napitupulu (PSEKP & UNESCAP CAPSA)
		- Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Dr. Hermanto Siregar (IPB)
		- Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	Dr. Sujana Royat (Menko Kesra)
		- Review Program-program Sektor Pertanian Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan	Ir. Harniati, MS (BPSDM Pertanian)
		- Pengalaman Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan	Ir. Epi Kustiawan, MP (Bappeda Jawa Barat)
		- Pengalaman LSM Dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin	Ir. Irawati H (LSM Bina Swadaya)

No.	Tanggal	Judul Makalah	Pembicara
3.		Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan : Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat	
	4-12-07	- Peran Pertanian Dalam Ekonomi Perdesaan	Dr. Harianto (FEM- IPB)
	Makalah Utama	- Kinerja dan Perspektif Kegiatan Non Pertanian Dalam Ekonomi Perdesaan	Dr. Kecuk Suhariyanto (BPS)
		- Pengembangan Komoditas Bernilai Tinggi (High Value Commodity) Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani	Dr. Ronnie R. Natawidjaja, (CAPAS-UNPAD)
	Makalah Penunjang	A. Kebijakan Dalam Perekonomian Pertanian dan Perdesaan	
		- Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan	Rachmat Hendayana dan Syahrul Bustaman
		- Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan	Iwan Setiajie A. dan Erma Suryani
		- Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai Dengan Kebijakan Tarif Optimal	Sri Nuryanti dan Reni Kustiari
		- Analisis Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju Terhadap Produksi Pertanian Indonesia	Saktyanu K. Dermoredjo, Wahida, dan Budiman Hutabarat
		- Analisa Dampak Penurunan Bantuan Domestik Negara Maju Terhadap Harga dan Penggunaan Sumberdaya Pertanian Indonesia	Helena J. Purba, Erna M. Lokollo dan Budiman Hutabarat
		- Peran Sektor Pertanian Dalam Pendapatan Rumah Tangga	Erna M.Lokollo dan Supena Friyatno
		- Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan Melalui Pengembangan Komoditas Bernilai Tinggi	Handewi P.Saliem dan Supriyati
		B. Agroindustri dan Ekonomi Masyarakat Perdesaan	
		- Peranan Agroindustri Perdesaan Dalam Perekonomian dan Perspektif Pengembangannya	Supriyati
		- Peran Sektor Agroindustri Dalam Perekonomian Nasional dan Pendapatan Rumah Tangga Pertanian	Sri Hery Susilowati
		- Strategi Memotivasi Profesionalisme Peternak Sapi Potong Rakyat: Analisis Peran dan Finansial Agen Rantai Pasok	Sri Wahyuni

No.	Tanggal	Judul Makalah	Pembicara
		- Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Agroindustri Pisang Di Kabupaten Lumajang	Herlina Tarigan
		- Peluang dan Kendala Pengembangan Agroindustri Sagu Di Kabupaten Jayapura	Herlina Tarigan dan Ening Ariningsih
		- Intensitas Pengembangan Ternak Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Bambang Winarso
		C. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berkelanjutan	
		- Dinamika Partisipasi Petani Padi Sawah Peserta Program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Di Jawa Barat	Supadi
		- Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai	Roosganda Elizabeth
		- Keragaan dan Kendala Pembiayaan Usahatani Ternak Sapi	Sugiarto dan Budi Wiryono
		- Analisis Tingkat Penerapan dan Manfaat Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Usahatani Lada di Provinsi Bangka Belitung	Adang Agustian dan Budiman Hutabarat
		- Budidaya Padi Ekologis Berbasis Partisipasi Masyarakat : Laporan Selayang Pandang Upaya Memotivasi Petani Dalam Menggerakkan Pertanian Perdesaan	Iwan Setiajie Anugrah
		- Dibutuhkan Dukungan Kebijakan Untuk Mengoptimalkan Peran Pedagang Hasil-Hasil Pertanian	Syahyuti

6.2.2. Pameran dan Ekspose

Untuk mengkomunikasikan hasil penelitian, selain dilakukan dengan penyelenggaraan seminar maupun publikasi juga disampaikan dalam bentuk ekspose/pameran. Melalui Ekspose/pameran teknologi ini diharapkan para stakeholder dapat melihat langsung hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian, khususnya hasil penelitian PSEKP.

6.2.3. Rapat Dewan Redaksi

Rapat Dewan Redaksi merupakan media komunikasi antar anggota Dewan. Tujuan dilakukan rapat Dewan Redaksi adalah membahas kelayakan naskah yang akan menjadi bahan penerbitan jurnal yang dikelolanya. Frekuensi rapat Dewan berbeda-beda, tergantung tingkat kepentingan di masing-masing publikasi. Frekuensi rapat rata-rata 1-2 kali untuk setiap nomor penerbitan

6.2.4. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan oleh PSEKP dalam kaitannya dengan dokumentasi meliputi:

- (1) Pembuatan serta pengelolaan internet dan website;
- (2) Pengambilan foto pada waktu acara seminar/ekspose, serta foto dalam rangka pembuatan panel untuk keperluan ekspose maupun dalam pembuatan leaflet;
- (3) Pembuatan audio visual seperti power point untuk keperluan seminar atau lokakarya;
- (4) Mendokumentasikan naskah publikasi, mulai dari naskah asli dari penulis, setelah diedit Dewan Redaksi dan Redaksi Pelaksana, perbaikan penulis, setting dan proof dari percetakan. Dokumentasi naskah-naskah publikasi dilakukan dalam bentuk print-out maupun dalam bentuk soft-file;
- (5) Mendokumentasikan makalah seminar baik dalam bentuk print out maupun dalam bentuk soft-file, dan rekaman seminar dari makalah yang dipresentasikan.

6.2.5. Pembuatan dan Pemeliharaan Website PSEKP

Sejak tanggal 25 Oktober 2005, PSEKP telah melakukan pemasangan (hosting) di server Badan Litbang di Jakarta dengan alamat situs <http://pse.litbang.deptan.go.id>. Agar khalayak lebih cepat mengenal website baru PSEKP tersebut, maka telah didaftarkan pada Search Engine Yahoo dan Google. Selain itu juga diperluas sosialisasinya melalui pembuatan leaflet.

Permasalahan yang menonjol dalam kegiatan Sub Bidang Pendayagunaan Hasil Analisis tahun 2007 adalah: (1) Kekurangan naskah untuk bahan penerbitan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; (2) Agak lambannya proses percetakan serta kualitas hasil cetak yang terkadang belum sesuai harapan. Sementara upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah (1) Melakukan sosialisasi jurnal yang diterbitkan ke peneliti baik lingkup Badan Litbang maupun di luar Badan Litbang; (2) Melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan penulis naskah; (3) Mencari percetakan yang

dipandang lebih capable dan menjalin komunikasi lebih baik dengan percetakan yang menjadi rekanan.

6.3. Kerjasama Penelitian

Kegiatan kerjasama penelitian yang dilakukan oleh PSEKP selama tahun 2007 meliputi kegiatan penelitian, bantuan teknis (mendampingi konsultan asing) dalam melaksanakan penelitian, dan mengirim instruktur dalam pelatihan-pelatihan, serta kegiatan kunjungan peneliti PSEKP ke luar Negeri. Inventarisasi kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 6.13 dan 6.14 berikut ini.

Tabel 6.13. Inventarisasi Kegiatan Kerjasama Penelitian Tahun 2007

No.	Judul Penelitian	Jangka Waktu	Mitra
1.	Egg Market in Eastern Indonesia	Okt 2006 – Maret 2007	IFC – PENSA, Bank Dunia
2.	Agriculture Sector Study for IFC SADI	Okt 2006 – Maret 2007	IFC – PENSA, Bank Dunia
3.	The Study of Effects of Physical Infrastructure on Poverty Alleviation and Human Capital Outcomes in Indonesia. INFRA/03/2007	Jan – Juni 2007	JBIC, IFPRI, World Bank
4.	The Role of Agriculture in Indonesia: Enhancing the Contribution of Agriculture to Poverty Reduction and Food Security	Jan – Des 2007	FAO
5.	Socio-economic Impact of AI Outbreaks and its Control Measures on Small-scale and Backyard Poultry Production in Indonesia	2007 – 2008	IDRC
6.	The Study to Assess the Livelihood and Gender Impacts of Rapid Changes to the Biosecurity Policy in Jakarta	Jun – Okt. 2007	FAO
7.	Penentuan Lokasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) No. 3200.0/18-09/-/2007 tanggal 31 Desember 2006	Okt – Des. 2007	DIPA Tahun Anggaran 2007 Badan Litbang Pertanian
8.	Rice Value Chain N#801188	Jan- Feb. 2008	Mercy Corps

Tabel 6.14. Kunjungan ke Luar Negeri Staf Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

No.	Judul Kegiatan	Jangka Waktu	Sumber Dana	Pelaksana	Negara Tujuan
1	The South and East Asian Strategic Dialogue on Rural Development Agricultural and Trade	8-10 Maret 2007	ICTSD	Dr. M. Husein Sawit	Vietnam
2	Agricultural Cooperation with Indonesia Programme	16 April - 6 Juli 2007	Pemerintah Australia	Ir. Saktyanu K. Dermorejo, MSi	Australia
3	World Trade Organization (WTO)	4-7 Mei 2007	P2HP	Dr. Budiman Hutabarat	Swiss
4	Agricultural in The WTO	7-11 Juni 2007	Action AID	Dr. M. Husein Sawit Dr. Erna Maria Lokollo	Swiss
5	Workshop on International Trade and WTO	19 Juni - 4 Juli 2007	Koica	Dr. Reni Kustiari	Korea
6	Trade Policy Review (WTO)	27-29 Juni 2007	Sekretariat Litbang	Dr. Tahlim Sudaryanto	Swiss
7.	Regional Programme Inception Workshop on Pro-Poor Policy Formulation Dialogue and Implementation The Country Level	28-29 Juni 2007	FAO	Dr. Nizwar Syafa'at	Thailand
8.	Technical Workshop Special Product (SPS) - WTO	3-5 Juli 2007	Sekretariat G-33 Departemen Perdagangan	Dr. Budiman Hutabarat	Swiss

Tabel 6.14. Lanjutan

No.	Judul Kegiatan	Jangka Waktu	Sumber Dana	Pelaksana	Keterangan
9	Workshop on Socioeconomic Impact of HPAI Out Breaks and Control Measures on Small-Scale and Backyard Poultry Producers in Asia	24-29 September 2007	IDRC	Dr. Edi Basuno Dr. Yusmichad YUSDJA Dr. Nyak Ilham	China
10	Enhancement of Womens Farmers Role in Development of Rural Asia	15-18 Oktober 2007	FFTC	Ir. Rita Nur Suhaeti MS	Korea
11	Taking Action for The Workshop Poor and Temporary People	17-19 Oktober 2007	IFPRI	Dr. Tahlim Sudaryanto	China
12	Regional Meeting on Towards a Joint Regional Agenda for The Allevation of Poverty Throught Agriculture and Secondary Crop Developmentr	21-22 Nopember 2007	CAPSA	Dr. I Wayan Rusastra Dr. Tahlim Sudaryanto	Thailand
13	Dialogue on tropical Product, Trade, Natural Resources Management and Poverty Thought Agriculture and Secondari Crop Development	3-5 Desember 2007	ICTSD/ICONE	Dr, M Husein Sawit	Brazil

VII. EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Ruang Lingkup

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) selama tahun 2007 mencakup dua kegiatan, yakni: (1) Monev kegiatan penelitian, dan (2) Monev pelayanan penelitian. Monev dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan penelitian mulai dari: (1) Tahap persiapan dengan cakupan materi : proposal operasional, juklak penelitian, rencana outline laporan, serta kuesioner; (2) Tahap pelaksanaan penelitian dengan materi meliputi: jumlah kuesioner yang telah terisi, laporan perjalanan, entry data (baik data primer maupun sekunder), dan Laporan Tengah Tahun; (3) Tahap pengolahan data dan penulisan dengan materi meliputi pengolahan data, tabulasi dan tabel analisa data primer dan sekunder, serta draft laporan; dan (4) Seminar hasil penelitian dan penyusunan laporan akhir.

Sedangkan monev pelayanan penelitian dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja pelayanan sebagai pendukung penelitian, meliputi pelayanan keproyekan, pengolahan data atau komputerisasi, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan agar hasil-hasil penelitian bisa berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna.

7.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pada tahun 2007, pelaksanaan kegiatan monev penelitian lingkup PSEKP dilakukan oleh Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala PSEKP. Evaluasi dilaksanakan menyatu dengan kegiatan monitoring, sedangkan tugas pelaporan dilaksanakan secara mandiri oleh Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Secara garis besar Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan telah melakukan kegiatan seperti: membantu mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dukungan penelitian dan administrasi institusi, melaksanakan kegiatan seminar proposal dan hasil penelitian, memonitor penyusunan laporan hasil penelitian, menyusun laporan institusi, baik untuk keperluan Badan Litbang Pertanian, Sekretariat Jenderal maupun Departemen Pertanian, dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Koordinasi kegiatan monev dilaksanakan mulai dari pelaksanaan seminar proposal operasional, perbaikan proposal operasional, pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak) penelitian, pembuatan outline penelitian, pembuatan kuesioner, penulisan review kegiatan penelitian

yang akan dilaksanakan, pembuatan laporan tengah tahun, seminar hasil penelitian, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Secara umum pelaksanaan kegiatan monev tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan laporan penelitian sudah berjalan dengan baik. Selain laporan penelitian, Tim Peneliti juga berkewajiban menyusun Policy Brief dan bahan Rapat Pimpinan tingkat Badan Litbang Pertanian dan Departemen Pertanian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Secara insidental, beberapa peneliti senior juga diminta menyusun laporan untuk kepentingan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan rakyat (DPR), dan berbagai laporan lain dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan Departemen Pertanian.

Kegiatan lain yang cukup penting dan sudah terlaksana dengan baik adalah penyusunan LAKIP. Dari tahun ke tahun pembuatan LAKIP terus mengalami penyempurnaan, khususnya menyangkut format laporan. Pembuatannya sampai saat ini tidak mengalami hambatan yang berarti, kecuali kesulitan dalam melakukan pengukuran manfaat dan dampak hasil penelitian mengingat output penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat tangible (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan pengetahuan rumusan kebijakan atau rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat intangible. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek karena baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di masyarakat.

7.2.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian

Seperti telah disebutkan sebelumnya, monev kegiatan penelitian pada dasarnya dilakukan dalam tiga tahap, yakni: (1) Tahap I, perencanaan kegiatan; (2) Tahap II, pelaksanaan kegiatan penelitian; dan (3) Tahap III, penyusunan laporan hasil penelitian.

(1) Monitoring dan Evaluasi Tahap I

Perencanaan merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim peneliti dan seluruh bidang pelayanan di lingkup PSEKP. Perencanaan yang dilakukan menyangkut tiga aspek, yaitu: (1) Jenis dan lokasi kegiatan yang akan dilakukan; (2) Susunan tim dan jadwal kegiatan, dan (3) Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap tim peneliti dan bidang pelayanan hendaknya menyusun perencanaan yang menyangkut ketiga aspek tersebut. Tujuannya agar terjadi sinkronisasi antara kegiatan penelitian dan kegiatan pelayanan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi.

Pada tahap ini, substansi mencakup tiga kegiatan, yaitu: (1) Menyusun proposal operasional yang menjadi acuan bagi seluruh

rangkaian kegiatan penelitian; (2) Mempersiapkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan yang telah dirancang dalam proposal, seperti kuesioner, juklak, outline laporan penelitian, dan review yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan; dan (3) Menguji relevansi penelitian dengan masalah pembangunan pertanian di daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian dan relevansi lokasi penelitian dengan topik penelitian yang dikaji.

Rangkaian kegiatan monev tahap I dimulai dengan kegiatan seminar proposal operasional untuk mengevaluasi relevansi penelitian yang akan dilakukan dengan kebutuhan dan masalah pembangunan pertanian di tingkat nasional. Seminar yang dihadiri oleh seluruh staf peneliti PSEKP ini mengundang berbagai stakeholders yaitu Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian, pihak Perguruan Tinggi, instansi lain di luar Departemen Pertanian, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, diundang juga pembahas dari Ditjen Tanaman Pangan, Biro Perencanaan Deptan, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, dan Direktur Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka. Berperan sebagai pimpinan sidang adalah Staf Ahli Menteri Pertanian, Kepala PSEKP, dan Peneliti senior PSEKP. Langkah ini ditempuh agar rencana penelitian dapat dievaluasi secara obyektif oleh pihak lain, terutama hal-hal yang menyangkut kaidah-kaidah ilmiah dalam pelaksanaan penelitian dan kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders.

Hasil seminar proposal operasional ini dijadikan sebagai salah satu bahan monev dalam rangka penajaman proposal operasional. Jumlah proposal yang diseminarkan pada tahun 2007 sebanyak 9 judul dari 12 judul penelitian yang dilaksanakan oleh PSEKP. Penelitian "Pengembangan Program Primatani" dan "Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian: Antisipatif dan Respon Terhadap Isu Aktual" tidak diikutsertakan pada Seminar Proposal tersebut.

Selanjutnya tim monev melakukan diskusi internal (rapat pleno) untuk mengevaluasi perbaikan proposal operasional sesuai hasil seminar. Evaluasi ini mengacu pada notulen seminar proposal yang dibuat oleh notulis masing-masing tim penelitian dilengkapi catatan tim monev saat seminar. Tim diharapkan mengakomodasi saran-saran atau masukan dari pembahas dan peserta seminar. Langkah ini ditempuh untuk memantau dan mengevaluasi kesiapan tim peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Terkait dengan kesiapan penelitian, Tim Monev mengevaluasi kelengkapan penelitian, seperti kesesuaian proposal operasional, petunjuk pelaksanaan penelitian (Juklak), outline laporan penelitian, dan kuesioner.

Tujuan rapat pleno Tim Monev adalah: (1) Mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan

penelitian di lapangan; (2) Evaluasi materi penelitian dan penyempurnaan bahan pengumpulan data lapangan, baik data primer maupun data sekunder; dan (3) Menciptakan sinkronisasi kegiatan yang akan dilakukan oleh tim penelitian dengan bidang pelayanan terkait. Pelaksanaan kegiatan yang dirancang oleh setiap tim penelitian dan bidang pelayanan terkait dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan kaidah yang berlaku.

(2) Monitoring dan Evaluasi Tahap II

Dalam proses pelaksanaan penelitian, monitoring yang dilakukan Tim Monev difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) Laporan perjalanan; (2) Laporan pengolahan data; dan (3) Laporan kemajuan penelitian. Pembuatan laporan perjalanan, bermanfaat untuk: (1) Mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapang agar segera dapat diantisipasi pemecahan masalahnya; (2) Mendapatkan bahan perumusan kebijakan dari hasil temuan di lapang; (3) Tertib administrasi; dan (4) Penyempurnaan rencana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Laporan perjalanan dibuat sesuai dengan frekuensi perjalanan tim penelitian ke lapangan. Secara umum, seluruh tim peneliti pada tahun anggaran 2007 telah membuat laporan perjalanan dengan baik dan tepat waktu. Laporan perjalanan yang dibuat selain memuat uraian kegiatan di lapangan, juga berisi hasil diskusi dengan stakeholder di daerah yang menarik untuk diungkap dan permasalahan tim peneliti dalam menjalankannya.

Monev terhadap pengolahan data dilakukan untuk mengantisipasi masalah dalam pengolahan data serta meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pengolahan dan analisis data. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan ini adalah target atau rencana penyelesaian dibanding tingkat pencapaian pada masing-masing tahap kegiatan. Frekuensi kegiatan monev pada pengolahan data dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing penelitian. Untuk menertibkan pelaksanaan pengolahan data, telah dibuat peraturan bahwa setiap tim peneliti yang akan berangkat ke lapangan (dimulai pada tahap II) harus sudah menyerahkan kuesioner yang telah diisi pada tahap pengambilan data sebelumnya.

Data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer yang diolah dari kuesioner jumlah dan ketebalannya bervariasi antar tim peneliti. Kuesioner yang berjumlah cukup banyak membutuhkan pengaturan dalam pengerjaannya, terutama pada tahap entry dan validasi data. Proses entry dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (First In First Out), artinya tim peneliti yang menyerahkan kuesioner lebih dulu akan dientry dan diolah lebih dulu, sehingga tercipta kelancaran dalam kegiatan pelayanan penelitian. Peneliti sendiri diharapkan kesadarannya untuk secepatnya menyerahkan kuesioner, data-data maupun informasi yang diperoleh dari lapang agar tidak terjadi

penumpukan di bagian entry dan pengolahan data, terutama pada tengah dan akhir tahun.

Tujuan utama penyusunan laporan kemajuan penelitian adalah: (1) Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil penelitian; (2) Meningkatkan kualitas hasil penelitian; dan (3) Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya secara berkesinambungan. Dengan demikian kegiatan penelitian dapat selesai tepat waktu dan diperoleh hasil sesuai yang direncanakan. Berdasarkan pengalaman, kontrol yang cukup ketat terhadap penyusunan laporan kemajuan sangat membantu ketepatan tim peneliti dalam menyelesaikan laporan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Tahapan setelah penyusunan laporan kemajuan penelitian (umumnya pertengahan tahun anggaran) adalah tim melanjutkan kegiatan pengumpulan data untuk lokasi penelitian yang belum dikunjungi. Apabila kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder telah selesai, maka Tim Peneliti dapat melakukan proses pengolahan dan analisis data. Selanjutnya Tim Peneliti dapat mulai menyusun draft laporan akhir hasil penelitian. Konsistensi antara judul, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan implikasi kebijakan harus terjaga dengan baik.

Sebelum menjadi laporan akhir hasil penelitian, draft laporan akhir hasil penelitian akan dilakukan seminar hasil penelitian dan dievaluasi oleh Tim Monev pada kegiatan Monev Tahap III. Kegiatan seminar hasil penelitian yang diadakan pada setiap akhir tahun anggaran, merupakan mata rantai penting untuk penyempurnaan hasil penelitian. Pada seminar ini, pembahas dan pimpinan sidang diundang dari luar PSEKP agar penyempurnaan hasil bisa optimal. Kegiatan seminar hasil difokuskan kepada konsistensi antara judul, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan implikasi kebijakan. Umpan balik yang diperoleh dalam seminar hasil digunakan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan hasil penelitian.

Seminar hasil juga bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian hasil kegiatan penelitian PSEKP. Dalam kaitan ini ada dua aspek yang penting untuk diperhatikan, yaitu pertama, mutu materi seminar, dan kedua, kemampuan peneliti mempresentasikan materi seminar untuk menjelaskan pada audience sehingga memperoleh tanggapan serta umpan balik untuk penyempurnaan hasil penelitian.

(3) Monitoring dan Evaluasi Tahap III

Tahapan akhir pelaksanaan monev adalah evaluasi terhadap laporan akhir hasil penelitian. Evaluasi laporan akhir perlu mendapatkan penekanan khusus karena merupakan produk akhir yang merupakan bahan baku utama produk berikutnya. Indikator evaluasi terdiri atas empat komponen utama, yaitu: (1) Konsistensi proposal dengan laporan hasil penelitian; (2) Koherensi pelaporan serta kedalaman dan ketajaman

hasil, pembahasan, perumusan, kesimpulan, dan implikasi kebijakan; (3) Aspek editorial yang menyangkut efisiensi penulisan, redaksional, penyajian tabel, dan kelengkapan/kemutakhiran pustaka; dan (4) Ketepatan waktu penyelesaian laporan.

Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas hasil penelitian, setiap tahun PSEKP melakukan penilaian terhadap laporan hasil penelitian. Sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian No. 84/KP.340/J.7/01/2008 dibentuk tim penilai independen berasal dari Badan Litbang Pertanian dan Staf Pengajar senior dari Institut Pertanian Bogor dengan bidang keilmuan yang berbeda. Tugas Tim Penilai adalah: (1) Menentukan kriteria penilaian terhadap laporan hasil penelitian; dan (2) Memberikan penilaian terhadap laporan akhir penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dari hasil penilaian dipilih tiga penelitian terbaik untuk diberi apresiasi dan penghargaan.

Keluaran penelitian berupa data dan laporan selanjutnya didokumentasikan secara baik. Dokumentasi data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Indikator data primer meliputi: (1) Kuesioner dan Buku Kode; dan (2) File data entry/olahan. Indikator data sekunder meliputi: (1) Dokumen asli (buku, lembaran data, CD/disket); (2) Dokumen olahan dan (3) File data entry/olahan.

Secara umum hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian dan kebijakan PSEKP dikelompokkan menjadi empat, sebagai berikut :

Pertama, sintesa, pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan opsi rumusan kebijakan (sintesa), pemikiran akademis mengenai evaluasi kebijakan pembangunan pertanian (pertimbangan) dan memperjuangkan suatu kebijakan yang dianggap layak dan patut atau menolak kebijakan yang dianggap tidak layak dan tidak patut (advokasi). Sintesa kebijakan disampaikan langsung kepada pimpinan Departemen Pertanian. Selain itu, PSEKP juga memiliki media reguler Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian sebagai sarana diseminasi dan diskusi kebijakan.

Kedua, rekayasa model inovatif kelembagaan pembangunan pertanian. Kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antar manusia untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Keberlanjutan sistem produksi dimungkinkan apabila inovasi teknologi dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Mengingat pentingnya faktor kelembagaan dalam pembangunan pertanian, maka PSEKP memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aspek kelembagaan ini. Salah satu rekayasa yang sedang dikembangkan adalah PRIMATANI yang dilakukan secara meluas di tingkat Badan Litbang Pertanian.

Ketiga, analisis deskriptif mengenai kinerja dan dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian yang meliputi: (1) Ekonomi makro dan mikro serta perdagangan internasional; (2) Pengelolaan sumberdaya dan agribisnis berkelanjutan; (3) Sistem inovasi teknologi pertanian; (4) Ketahanan pangan dan kemiskinan; dan (5) Dinamika sosial ekonomi pedesaan. Hasil penelitian ini, berupa parameter mengenai perilaku ekonomi makro dan mikro untuk menunjang analisis maupun perumusan model kebijakan pembangunan pertanian. Beberapa parameter penting yang telah dihasilkan antara lain elastisitas permintaan dan konsumsi rumah tangga, penawaran dan produksi, dan transmisi harga. Parameter-parameter tersebut merupakan landasan untuk penyusunan model simulasi maupun analisis perumusan kebijakan. Hasil analisis deskripsi digunakan untuk menyusun highlight situasi terkini kinerja pembangunan pertanian dan lingkungan strategisnya. Laporan singkat ini dibuat dan disampaikan secara reguler kepada pimpinan Departemen Pertanian dalam rangka mewujudkan well informed policy making.

Keempat, sarana dan prasarana simulasi evaluasi kebijakan, kinerja dan dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian. Hasil kegiatan ini berupa pangkalan data dan model simulasi dinamika ekonomi makro dan mikro. Data merupakan prasarana untuk membuat analisis, deskripsi dan membangun model. Model digunakan untuk mensimulasikan dan mengevaluasi skenario-skenario kebijakan pembangunan pertanian.

PSEKP telah memiliki database, model proyeksi harga yang dapat digunakan untuk memproyeksikan perkembangan harga beberapa bulan ke depan, dan model proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pangan yang dapat digunakan untuk memperkirakan produksi dan konsumsi beberapa tahun ke depan. Selain itu, PSEKP juga mempunyai pangkalan data dinamika ekonomi pedesaan yang diperoleh dari kegiatan penelitian Panel Petani Nasional (PATANAS). Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisis secara kontinyu perubahan dinamika sosial ekonomi pedesaan. Penelitian Patanas, mulai dilaksanakan pada tahun 1983/1984 dan setelah sempat terhenti pada tahun 1987/1988, kemudian dilanjutkan kembali secara kontinyu mulai tahun 1993/1994 hingga 2008. Lokasi penelitian Patanas tersebar di beberapa propinsi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian Patanas, seperti perumusan kebijakan pembangunan pertanian dalam penetapan harga dasar gabah, program penanggulangan kemiskinan, kajian dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998 terhadap sektor pertanian, dan lain-lain. Terkait penelitian PATANAS, sejak tahun 2005 hingga 2007, PSEKP telah bekerja sama dengan Pusdatin, Deptan dalam melakukan pengambilan data yang mengkaji aspek profitabilitas dan pengusahaan lahan pertanian, nilai tukar pertanian, dinamika harga

input dan output serta tenaga kerja pertanian. Data PATANAS tersebut selain telah dimanfaatkan oleh mahasiswa dan institusi di dalam negeri, juga banyak dimanfaatkan oleh institusi dari luar negeri seperti World Bank, IFPRI, ACIAR, FAO, JBIC, dan lain-lain.

7.2.2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Penelitian

Dalam melaksanakan fungsi penelitian, PSEKP didukung oleh: (1) Pelayanan keproyekan; (2) Pelayanan pengolahan data; (3) Pelayanan perpustakaan; (4) Pelayanan publikasi; (5) Pelayanan sarana penelitian; (6) Web-site dan internet, dan (7) Database. Seluruh aspek layanan ini diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian sebagai salah satu tupoksi PSEKP. Agar kinerja seluruh aspek layanan tersebut optimal, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

(1) Pelayanan Keproyekan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan monev pada pelayanan keproyekan adalah untuk meningkatkan ketepatan perencanaan sesuai dengan Rencana Operasional Proyek (ROP). Instrumen kegiatan monev keproyekan adalah ROP terdiri dari pos gaji upah, bahan, perjalanan dan lain-lain pengeluaran. Sebelum pelaksanaan penelitian ke lapang, kegiatan monitoring dan evaluasi juga melibatkan pihak peneliti dengan pelaksana keproyekan untuk penyesuaian jadwal keberangkatan dan hal teknis yang berkaitan dengan prosedur keproyekan di lapang yang harus dilakukan oleh peneliti.

Indikator yang digunakan pada kegiatan ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan solusi pemecahan masalah. Secara umum kinerja pelayanan keproyekan berjalan baik, birokrasi tidak berbelit sehingga memudahkan seluruh pegawai melaksanakan kegiatan kedinasan.

(2) Pelayanan Pengolahan Data

Pelayanan pengolahan data bertugas untuk entry data (primer dan sekunder) serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Data diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kegiatan monev pelayanan pengolahan data, meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hardware. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi SDM adalah: (1) Jumlah orang; (2) Pembagian kerja; dan (3) Kompetensi. Sedangkan untuk mengevaluasi hardware adalah: (1) Jumlah komputer tersedia; (2) Kapasitas; dan (3) Manajemen pemanfaatannya. Indikator dalam jadwal kerja pengolahan data untuk setiap judul penelitian adalah : (1) Perencanaan; dan (2) Pelaksanaan.

Dari sisi pengadaan, sarana dan prasarana pengolahan data telah tersedia dengan baik, seperti jumlah tenaga input data, validasi dan pengolahan data, komputer, printer, dan sarana pendukung lainnya. Ketersediaan sarana pengolahan data yang sudah memadai perlu

diimbangi dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara optimal. Selama ini terlihat bahwa terdapat bulan-bulan yang kurang optimal dalam jadwal kerja pengolah data dan terdapat bulan-bulan kerja yang over load. Sebagai contoh, awal tahun ketika kegiatan penelitian belum dimulai, kegiatan pengolahan data relatif hanya membantu membuat desain kuesioner dan beberapa staf yang mengentry data sekunder. Fenomena yang kontras terlihat pada saat tengah dan akhir tahun ketika kegiatan penelitian telah berjalan. Entry dan pengolahan data beberapa tim penelitian dilakukan secara bersamaan, akibatnya pekerjaan menumpuk di tengah dan akhir tahun. Semua tim peneliti mempunyai kepentingan dan jadwal yang sama untuk menyelesaikan laporan penelitian, sehingga pengolah data harus dapat melayani seluruh tim peneliti dengan baik dan merata. Namun demikian, telah diupayakan pengaturan pekerjaan pengolahan data dengan sistem FIFO (First In First Out).

(3) Pelayanan Perpustakaan

Sebagai salah satu unit pelaksanaan penelitian, khususnya dalam bidang sosial ekonomi pertanian adalah keberadaan unit perpustakaan. Perpustakaan sangat penting dan vital dalam menunjang kegiatan penelitian, karena sangat membantu untuk penelusuran bahan-bahan referensi terkait penelitian. Indikator evaluasi monev perpustakaan meliputi : (1) Stok buku/bahan pengetahuan; (2) Penyajian dan pelayanan; (3) Tingkat pemanfaatan menurut pengguna; (4) Tingkat pemanfaatan menurut bahan; dan (5) Masalah yang dihadapi.

PSEKP memiliki satu unit perpustakaan dengan koleksi buku dan majalah ilmiah yang cukup lengkap, baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Koleksi pustaka yang terdapat di perpustakaan PSEKP mencakup : publikasi ACIAR, statistik BPS, brosur, buku teks dan laporan penelitian, publikasi CGPRT, Statistik Dalam Angka, publikasi IFPRI, kliping koran dari berbagai media massa, artikel majalah, artikel prosiding, laporan SAE, laporan Studi Dinamika Pedesaan (SDP), makalah seminar, statistik non BPS, skripsi/thesis/disertasi, dan judul majalah. Untuk melengkapi kebutuhan informasi terkini yang dibutuhkan oleh para peneliti, maka perpustakaan juga berlangganan koran Kompas, Republika, Bisnis Indonesia, Sinar Tani serta majalah Trubus. Jumlah koleksi buku dan majalah akan terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial ekonomi pertanian.

Jumlah pustakawan yang mengelola perpustakaan sebanyak 5 orang. Untuk membantu mempermudah pengguna dalam menelusuri pustaka yang dimiliki, perpustakaan PSEKP telah dilengkapi dengan dua buah unit komputer yang digunakan untuk melayani konsumen dalam mendukung kelancaran penelusuran pustaka. Selain itu komputer juga digunakan untuk menyimpan dan mem-file data-data pustaka yang tersedia. Kenyamanan pengunjung perpustakaan semakin bertambah

dengan dilengkapinya ruangan baca dengan sistem pendingin udara. Untuk mendukung kinerja perpustakaan PSEKP, TA. 2008/2009 diharapkan perpustakaan digital dapat segera direalisasikan, sebagai bagian dari sarana yang saat ini dibutuhkan oleh pengguna.

(4) Pelayanan Publikasi

Salah satu tugas PSEKP adalah mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian yang dalam pelaksanaannya dapat berupa publikasi. Beberapa publikasi yang diterbitkan oleh PSEKP pada tahun 2006 adalah: (1) Jurnal Agro Ekonomi (JAE); Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE); (3) Analisis Kebijakan Pertanian; (4) Prosiding hasil seminar; (5) Monograph; (6) Laporan tahunan; (7) Working Paper; dan (8) Laporan teknis hasil penelitian. Isi dari setiap jenis publikasi ilmiah tersebut secara rinci telah dijelaskan pada Bab VI. Agar kinerja layanan publikasi optimal, maka diperlukan evaluasi kegiatan monev pelayanan publikasi, mencakup : (1) Perencanaan penerbitan; dan (2) Distribusi, yang terdiri dari rencana dan jadwal distribusi, serta wilayah distribusi.

Melalui media penerbitan ilmiah tersebut peneliti PSEKP dapat menyalurkan ide, pemikiran dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan sosial ekonomi pertanian secara baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketersediaan media yang cukup banyak tersebut sangat membantu peneliti dalam meningkatkan dan memelihara jabatan fungsional peneliti. Secara umum kinerja layanan publikasi cukup baik. Permasalahan yang kadang dihadapi adalah kurangnya naskah yang layak terbit menjelang jadwal penerbitan.

(5) Sarana Penelitian

Sarana penelitian yang dimaksud dalam konteks ini adalah sarana alat tulis kantor (ATK) terdiri dari komputer, printer, tonner, kertas, disket, dan ATK lainnya serta sarana kendaraan dinas. Indikator yang digunakan dalam kegiatan monev pelayanan sarana penelitian adalah: (1) Rencana pengadaan, yang terdiri dari jadwal, jenis dan jumlah dan (2) Realisasi pengadaan, yang terdiri dari jadwal, jenis dan jumlah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa layanan sarana penelitian cukup baik dan memadai. Komputer yang dilengkapi fasilitas internet telah tersedia di setiap ruangan peneliti. Untuk kelancaran komunikasi internal kantor disediakan pula interkom atau telepon penghubung di setiap ruangan peneliti sehingga memudahkan akses peneliti dan petugas pelayanan penelitian untuk berkomunikasi, baik intern maupun menerima telpon dari luar kantor. Kebutuhan ATK baik untuk kegiatan penelitian di lapangan maupun di kantor cukup memadai. Demikian halnya dengan fasilitas kendaraan dinas, peneliti diberikan fasilitas menggunakan kendaraan dinas untuk kegiatan terkait penelitian. Mengingat jumlah kendaraan dinas terbatas, maka fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk perjalanan pendek seperti Jakarta-Bogor.

(6) Website dan Internet

Sebagai satu-satunya unit kerja yang khusus menangani kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian di Departemen Pertanian, PSEKP telah dikenal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari frekuensi kerjasama penelitian antara PSEKP dengan lembaga riset dalam dan luar negeri. Sebagai institusi publik, maka selayaknya PSEKP memiliki sarana untuk dapat menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Untuk lebih memberikan pelayanan yang optimal dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan melalui diskusi dengan publik, PSEKP telah membangun situs atau Website dengan alamat: <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>. Website ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun stakeholders yang membutuhkan data dan informasi mengenai kegiatan PSEKP. Website tersebut juga menjadi sarana komunikasi hubungan kerja antara PSEKP dengan lembaga riset lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain Website, beberapa tahun terakhir PSEKP telah membangun jaringan internet di setiap ruangan peneliti dan pejabat struktural. Pembangunan jaringan internet dimaksudkan agar para peneliti dan pejabat struktural dapat mengakses perkembangan informasi secara cepat dan murah. Jaringan internet ini berperan mempermudah mengakses data dari berbagai institusi di seluruh dunia. Dengan demikian diharapkan kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

(7) Database

Dalam penelitian ilmiah, peranan data sangat strategis. Pada hakekatnya nilai hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh data dan informasi yang menjadi bahan analisisnya. Guna memenuhi kebutuhan terhadap data yang berkualitas dan didapat secara cepat, maka diperlukan manajemen data yang baik. Manajemen data yang baik bukan hanya membantu terciptanya pelaksanaan penelitian yang baik tetapi juga mempermudah sistem verifikasi data dan informasi antar lembaga terkait. Oleh sebab itu, kegiatan manajemen data dilakukan sebaik mungkin oleh setiap lembaga, terutama lembaga yang berkecimpung dalam penelitian maupun administrasi penyelenggaraan pembangunan.

Berbeda dengan lembaga/instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya secara langsung berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat umum, output yang dihasilkan lembaga penelitian berupa hasil penelitian. Tercakup dalam gugus output tersebut adalah data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rekomendasi kebijaksanaan. Berhubung sifatnya untuk mendukung pemecahan masalah maka hampir semua penelitian yang ditujukan untuk

menghasilkan output tersebut adalah penelitian terapan. Pengguna utama atau stakeholder terpenting adalah pemerintah. Pengguna lainnya adalah para peneliti, pihak swasta, mahasiswa, petani, peternak, dan lain sebagainya.

PSEKP melakukan aktivitas manajemen data mencakup tiga aspek yaitu : (1) Pengembangan sistem database; (2) Pengembangan kapabilitas programmer dan analis; dan (3) Pengembangan infrastruktur pendukung. Ketiga aspek itu mutlak dibutuhkan dalam mewujudkan sistem data yang berdaya guna. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan database tahun 2007 hasilnya cukup banyak dan bervariasi mulai dari up dating (pemutakhiran) data, entry data baru sampai pada pengadaan data yang sudah dikelola oleh lembaga lain, seperti BPS, Bank Indonesia, Deperindag, WTO, dan FAO. Pemutakhiran data yang dilakukan umumnya tergantung pada ketersediaan data dari instansi yang menerbitkan. Demikian halnya dengan kegiatan entry data baru dan pengadaan data, dalam pelaksanaannya telah diusahakan sejauh mungkin sampai pada kondisi yang terkini.

VIII. ANGGARAN

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran yang dikelola setiap unit instansi pemerintah pada tahun 2007 tidak dibedakan berdasarkan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin, namun dilakukan berdasarkan “anggaran yang berbasis kinerja”. Anggaran PSEKP tahun 2007 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosia/BLM dan lainnya, sedangkan variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: (1) Kegiatan utama, meliputi: (a) Teknologi Pengembangan Agribisnis Pertanian Terpadu, (b) Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dan (2) Kegiatan Penunjang.

Total anggaran PSEKP Tahun 2007, baik menurut variabel jenis pengeluaran maupun variabel kegiatan, terealisasi sebesar 92,19 persen atau terealisasi sebesar Rp 13,47 milyar dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 14,62 milyar. Pada anggaran menurut variabel jenis pengeluaran, dana yang terbesar terserap pada jenis pengeluaran belanja modal, yakni sebesar 96,11 persen atau terealisasi sebesar Rp 588 juta dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 612 juta. Sedangkan pada anggaran menurut variabel jenis kegiatan, sebagian besar merupakan anggaran kegiatan utama yang terdiri atas: 1) Teknologi pengembangan agribisnis pertanian terpadu, dan 2) Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Serapan dana variabel kegiatan utama untuk masing-masing kegiatan tersebut terealisasi sebesar 92,19 persen dan 92,43 persen. Sedangkan untuk kegiatan penunjang yang direncanakan sebesar Rp 38,20 juta tidak terealisasi. Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2007 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1. dan Tabel 8.2.

Tabel. 8.1. Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2007 (Per 31 Desember 2007)

Variabel/Parameter Keuangan	Pagu DIPA	%	Realisasi Bulan ini	%	Rencana Kumulatif s/d Bulan ini	%	Realisasi Kumulatif s/d Bulan ini	%	Sisa Anggaran s/d Bulan ini	
A										
Per Jenis Pengeluaran	(1,2,3,4 Diisi alokasi anggaran menurut pengeluaran sesuai DIPA; terutama Belanja Bantuan Sosial=Bantuan Langsung Masyarakat; sedangkan Lainnya diisi anggaran menurut jenis pengeluaran lainnya selain di atas)									
1) Belanja Pegawai	7,843,905,000	54.22	603,953,308	7.70	7,843,905,000	100.00	6,579,346,028	83.88	1,264,558,972	
2) Belanja Barang	6,308,864,000	43.61	576,245,265	9.13	6,308,864,000	100.00	4,954,501,523	78.53	1,354,362,477	
3) Belanja Modal	314,000,000	2.17	242,170,600	77.12	314,000,000	100.00	242,170,060	77.12	71,829,400	
4) Belanja Bantuan Sosial	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
5) Lainnya	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
Total A	14,466,769,000		1,422,369,173	9.83	14,466,769,000		11,776,018,151	81.40		
D										
Per Kegiatan	Diisi alokasi dana untuk setiap kegiatan utama; sisanya non utama adalah penunjang; Setiap kegiatan utama harus mempunyai output yang jelas dan terukur;									
1). Kegiatan Utama										
1. Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1527	5,833,336,000	100.00	535,892,559	9.19	5,833,336,000	100.00	4,509,981,309	77.31	1,323,354,691
Jumlah Kegiatan Utama		5,833,336,000	100.00	535,892,559	9.19	5,833,336,000	100.00	4,509,981,309	77.31	1,323,354,691
2) Kegiatan Penunjang										
1. Pengelolaan Gaji	0001	7,232,245,000	83.77	516,659,294	7.14	7,232,245,000	100.00	6,081,413,469	84.09	1,150,831,531
2. Operasional Kantor	0002	933,521,000	10.81	93,046,540	9.97	933,521,000	100.00	771,132,683	82.60	162,388,317
3. Perawatan Gedung	0003	204,392,000	2.37	12,680,000	6.20	204,392,000	100.00	201,440,000	98.56	2,952,000
4. Perawatan Sarana	0004	263,275,000	3.05	23,546,500	8.94	263,275,000	100.00	233,564,200	88.71	29,710,800
Total D		8,633,433,000	100.00	645,932,334	7.48	8,633,433,000	100.00	7,287,550,352	84.41	1,345,882,648
Jumlah		14,466,769,000		1,181,824,893	8.17	14,466,769,000		11,797,531,661	81.55	2,669,237,339

Tabel. 8.2. Rekapitulasi PNBP Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2007 (Per Desember 2007)

No.	Kode MAK	Uraian	Perkiraan Target Penerimaan	Penerimaan	Penyetoran	Sisa Target Penerimaan	Target (%)
		Penerimaan Umum					
1	423131	Pendapatan Sewa Rumah Dinas	-	672,000	672,000	-	-
2	423139	Pendapatan Sewa Benda-Benda Tak Bergerak Lainnya	40,000,000	-	-	40,000,000	-
3	423151	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5,000,000	-	-	5,000,000	-
4	423159	Penerimaan II Jasa Lainnya	23,000,000	500,000	500,000	22,500,000	2.17
5	423424	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj.LN TAYL	1,100,000	-	-	1,100,000	-
6	423421	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	5,400,000	13,908,225	13,908,225	(8,508,225)	257.56
7	423442	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Negara	-	572,400	572,400	(572,400)	-
8	423473	Pendapatan atas Denda Administrasi BPHTB	-	-	-	-	-
9	423423	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	3,300,000	-	-	3,300,000	
		Jumlah Penerimaan Umum	77,800,0000	15,652,625	15,652,625	62,819,375	20.12
		Penerimaan Fungsional					
1	423146	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJB	-	-	-	-	-
		Jumlah Penerimaan Fungsional	-	-	-	-	-
		Jumlah Penerimaan Umum + Fungsional	77,800,000	15,652,625	15,652,625	62, 819,375	20.12

IX. PENUTUP

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai salah satu lembaga penelitian, telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban berdasarkan aturan dan mekanisme kegiatan pada sebuah lembaga penelitian lingkup Departemen Pertanian. Landasan pelaksanaan kegiatan dan manajemen institusi dengan berbasis kinerja, senantiasa menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tupoksi lintas Departemen serta lintas lembaga eksternal Non Departemen di tingkat nasional maupun dalam skala internasional lainnya.

Penekanan kinerja melalui penerapan “Good Governance” juga menjadi acuan bagi setiap penggunaan anggaran pendukung dalam proses pendanaan kegiatan serta manajemen institusi secara keseluruhan. Dengan demikian, tuntutan output yang berbasis kinerja dengan penganggaran yang digunakan, diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Melalui kegiatan penelitian TA. 2007, PSEKP telah berkontribusi memberikan hasil-hasil pemikiran, ide, saran dan masukan konkrit bagi kebijakan Pemerintah, sejalan dengan proses dan perkembangan pembangunan pertanian, baik secara nasional maupun di tingkat internasional. Harapan selanjutnya, kualitas hasil penelitian PSEKP dimasa mendatang lebih meningkat, sehingga mampu memberikan implikasi kebijakan yang lebih baik.